

SKRIPSI

Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Insubordinasi

Dalam Lingkungan Peradilan Militer

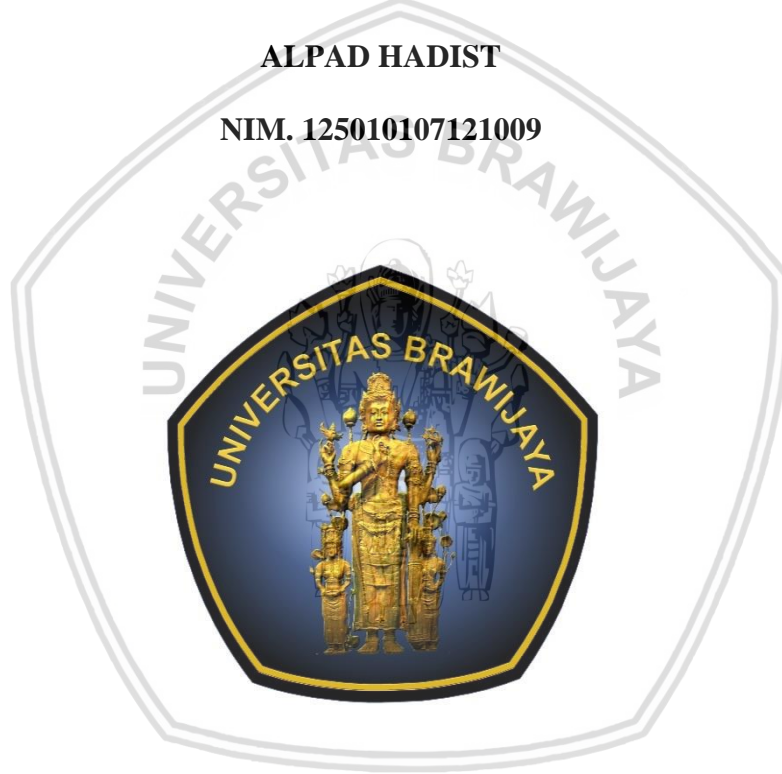
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/MIL/2016)

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ALPAD HADIST

NIM. 125010107121009



KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi: DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
INSUBORDINASIDALAM LINGKUNGAN PERADILAN
MILITER (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR: 252 K/MIL/2016)**

Identitas Penulis :

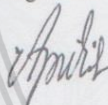
- a. Nama : Alpad Hadist
- b. NIM : 125010107121009

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian : 4 Bulan

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama



Dr. Nurini Apriandi, SH.M.Hum.,
NIP. 19760429 200212 2 001

Pembimbing Pendamping

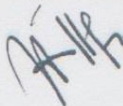


Fines Fatimah, SH.MH.,
NIK. 201208 861121 2001

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Pidana



Dr. Yuliati, SH., LLM.,

NIP. 19660710 199203 2 003



HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA INSUBORDINASI DALAM LINGKUNGAN
PERADILAN MILITER
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 252/K /MIL /2016)**

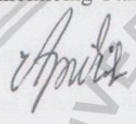
Alpad Hadist

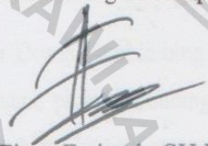
NIM. 125010107121009

Skrripsi ini telah disahkan oleh majelis Penguji pada Tanggal: 7 Juni 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Nurini Aprilianda, SH.M.Hum.,
NIP. 19760429 200212 2 001


Fines Fatimah, SH.MH.,
NIK. 201208 861121 2001

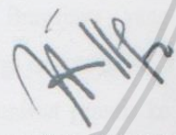
Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Pidana




Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.
NIP. 19620805 198802 1


Dr. Yuliati, SH.LLM.,
NIP. 19660710 199203 2 003



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunianya yang tiada henti sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Syafa'at, S.H. M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
2. Dr. Yulianti SH., LLM, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Nurini Aprilianda, SH, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama atas kebaikan dalam meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bimbingan dan motivasinya serta kesabarannya yang luar biasa untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
4. Ibu Fines Fatimah, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas kebaikan dalam meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bimbingan serta motivasinya yang sangat luar biasa dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi.
5. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan banyak pelajaran yang sangat berharga bagi penulis.
6. Kedua orang tua yang telah melahirkan dan merawat penulis ke dunia, telah memberikan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, cinta kasih dan senantiasa mendoakan serta memberikan dukungan atas kelancaran penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Seluruh teman – teman se-angkatan 2012 yang telah memberikan pengalaman banyak bagi penulis dan memotivasi penulis dalam menyusun skripsi.
8. Pihak – pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis senutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Juni 2018

Penulis



RINGKASAN

Alpad Hadist, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Mei 2018, **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA INSUBORDINASI DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 252 K/MIL/2016)**, Dr. Nurini Aprilianda SH.M.Hum, Fines Fatimah, SH.MH.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/MIL/2016). Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya putusan yang terdapat pada peradilan tingkat pertama, banding serta kasasi terdapat perbedaan pendapat dari hakim dalam memutus satu perkara yang sama. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, peneliti bermaksud untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara khususnya perkara tindak pidana insubordinasi. Pada putusan tingkat pertama dan banding terdakwa diputus bersalah. Namun, pada tingkat kasasi terdakwa diputus bebas oleh hakim.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah yang dilakukan terdakwa koptu suparman merupakan tindak pidana insubordinasi dalam lingkungan peradilan militer? (2) Apa yang menjadi dasar hakim Mahkamah Agung yang memutus perkara dengan Nomor : 252/K/MIL/2016 terhadap terdakwa koptu suparman?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis penafsiran gramatikal yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan cara melakukan menentukan isi atau makna kata per kata aturan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan, serta dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pada kasus yang diangkat, semua pertimbangan penuntut umum serta Majelis Hakim pada 2 tingkat peradilan sebelumnya yaitu tingkat pertama dan tingkat banding ditolak serta dinyatakan tidak dapat diterima pada tingkat kasasi. Hakim memiliki kewenangan untuk memutus suatu perkara. Pertimbangan hakim sangat mempengaruhi penjatuhan putusan yang diberikan terhadap terdakwa. Hakim harus memiliki ketelitian dan penafsiran yang tinggi. Hakim diharapkan dapat memberikan putusan dengan pertimbangan seadil-adilnya dan mendengarkan kedua belah pihak. Putusan hakim sangat memberikan dampak baik positif maupun negatif bagi terdakwa.

SUMMARY

Alpad Hadist, Criminal Law Faculty of Law, University of Brawijaya Malang, May 2018, Basis of consideration decisions judge for insubordination case in sent do of military court (Study district court decision number : 252 K/MIL/2016), Dr. Nurini Aprilianda SH.M.Hum, Fines Fatimah, SH.MH

In this skripsi , writer raised problems Basis of consideration decisions judge for insubordination case in sent do of military court (Study district court decision number : 252 K/MIL/2016). The choice of the theme of here because there was court decision by the fact that there which is found in the judiciary of the the first degree , an appeal as well as procedure there was a gap in the opinion of the judge in charge of one case per confirming it who cut asunder the same. Based on the background mentioned above, researchers intend to analyze consideration the judge in break matter especially matter of corruption procurement videotron. To the award in the first degree and appeal the defendant were found guilty .But , on the level of procedure the defendant were found free by a judge.

Based on it built with the sweat of , the work of write this down staff should lift itself up fact the formulation of a problem: (1) What did the defendant of koptu suparman be a criminal act of insubordination? (2) What basis of consideration decisions judge in supreme court number: 252 K/MIL/2016 to the defendant of koptu suparman?

Then the writing of a piece of writing it uses a method of juridical normative with methods of intervention and regulations (statute approach) and approach the concept of (conceptual approach). Material primary law , secondary , and tertiary obtained writer will be analyzed using a technique grammatical analysis with the interpretation of which is that the method of analysis material law with a way of doing determine the content or the meaning of a word per said the rule of law of a legislation , and associated with over the formation of law and rule that become a reference in resolving problems the law who are the objects of the study.

Of research results with the method above, the author answers to existing problems that the case raised, all considerations of the public prosecutor and the Tribunal Judges on the judicial level 2 before first grade and level of appeal rejected and declared inadmissible at the level of Cassation. The judge has the authority to decide a case .The judge is affecting penjatuhan a verdict rendered against the defendant. Judge to be having greater an interpretation of the high.Judge is expected to provide the award by consideration of judges and listen to both sides.Judicial decisions gives the impact of either positive or negative for the defendant.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Tentang Tindak Pidana Militer.....	12
1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Militer.....	12
1.1 Pengertian Militer.....	12
1.2 Pengertian Hukum Pidana Militer.....	13
1.3 Pengertian Hukum Acara Pidana Militer	14
1.4 Pengertian Tindak Pidana Militer	15
1.5 Subjek Tindak Pidana Militer	15
1.6 Jenis Tindak Pidana Militer Pada Kalangan Militer.....	16
1.6.1 Tindak Pidana Militer Murni.....	16
1.6.2 Tindak Pidana Militer Campuran.....	17
B. Kajian Tentang Tindak Pidana Insubordinasi	17
1. Pengertian Tindak Pidana Insubordinasi.....	17
2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Insubordinasi.....	20
C. Kajian Tentang Kewenangan Hakim	23
1. Hakim.....	23
2. Kewajiban Hakim.....	24
3. Peran Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	25
4. Tugas Dan Wewenang Hakim Dalam Proses Peradilan.....	28
D. Kajian Tentang Putusan Pengadilan.....	31
1. Pengertian Putusan Pengadilan	31
2. Macam-macam Putusan Di Pengadilan.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	42
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	43
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	44
F. Definisi Konseptual.....	45



BAB IV PEMBAHASAN

A. Analisis Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Koptu Suparman Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Insubordinasi.....	46
1. Uraian kasus / Posisi kasus.....	46
2. Analisis Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Koptu Suparman	48
B. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor: 252 K/MIL/2016.....	58
1. Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 17-K/PM-I- 04/AD/II/2016.....	59
2. Putusan Pengadilan Militer Tinggi – I Medan Nomor : 51-K/PMT- I/BDG/AD/IV/2016.....	62
3. Faktor Dan Alasan Hakim Mahkamah Agung Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Koptu Suparman.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perbuatan pidana sering disebut dengan beberapa istilah seperti tindak pidana, peristiwa pidana, dan delik. Dimaksud dengan perbuatan pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam laporan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana harus diberi arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan untuk dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Suatu larangan itu ditujukan kepada perbuatan dimana suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh tingkah laku orang itu sendiri. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkannya.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Yang dimaksud dengan perbuatan yaitu kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan. perbuatan pidana menunjuk pada sifat perbuatannya saja.¹ Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

¹ R. Abdoel Djamali, **Pengantar Hukum Indonesia**, Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hlm 12.

larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.² Hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu Hukum Pidana dan Hukum Pidana Khusus. Hukum Pidana Khusus salah satu didalamnya adalah Hukum Pidana Militer, hal ini dikhususkan dikarenakan hanya seseorang yang beralih status dari sipil menjadi militerlah yang apabila dihakimi atau diadili oleh Majelis Hakim haruslah pada Peradilan Militer bukan lagi pada Peradilan Negeri.

Tentara Nasional Indonesia atau disebut juga Prajurit TNI adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan, yang dalam pengertian umum Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut, dan Angkatan Udara.³ Peradilan militer diberi wewenang oleh undang-undang sebagai peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh golongan penduduk yang tersusun secara organis dalam TNI, yang secara khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas negara dibidang penyelenggara pertahanan negara yang ditundukkan dan diberlakukan hukum militer. Sejak Bulan Agustus 2004 semua badan-badan peradilan telah berada dalam satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Penegasan kebijakan satu atap (*One Roof System*) sejak Amandemen Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Kekuasaan dan Kehakiman masih tetap mengatur

²*Ibid*, hlm 56.

³ Pasal 21 Buku Saku Prajurit, Edisi Maret 2006, Mabes TNI Badan Pembina Hukum.

tentang administrasi, dan finansial. Dalam hal beracara di Peradilan Militer diatur dengan ketentuan khusus, yaitu Hukum Acara Peradilan Militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya desingkat UU Peradilan Militer).

Setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disebut KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), Peraturan Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum militer inilah yang diterapkan kepada semua Prajurit TNI, baik Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan masyarakat umum, dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum. Dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan atau melihat dari atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan, berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tertulis. Penyidik yang dimaksud disini adalah:⁴

1. Atasan yang berhak menghukum
2. Polisi Militer
3. Oditurat

Penyidik Pembantu adalah:

1. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
2. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

⁴Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 *tentang Peradilan Militer*

3. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara

4. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tekad Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan serta melestarikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diwujudkan dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Disiplin prajurit mutlak harus ditegakan demi tumbuh dan berkembangnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam mengemban dan mengamalkan tugas yang telah dipercayakan oleh bangsa dan Negara kepadanya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap prajurit untuk menegakan disiplin. Penegakan disiplin dikalangan angkatan bersenjata, harus dilaksanakan oleh setiap anggota tanpa melihat pangkat serta kedudukan. Upaya penegakan disiplin di dalam tata kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memerlukan suatu tatanan disiplin prajurit berupa Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Hal ini didasarkan, karena untuk pelanggaran tindak pidana tertentu, ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan kalau hanya berlaku hukum pidana umum. Tindak pidana militer pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dibagi menjadi dua bagian.

Tindak pidana militer murni adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Sedangkan Tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundangxii undangan

lain, akan tetapi diatur lagi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut. Untuk menyelesaikan setiap tindak pidana militer yang terjadi jelas diperlukan juga hukum acara pidana militer yang akan memuat mengenai proses pemeriksaan suatu perkara pidana militer di dalam suatu pengadilan. Dalam Undang-undang No.31 Tahun 1997, dikemukakan mengenai kewenangan peradilan militer untuk menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Peradilan Militer selain itu juga dapat mengadili tuntutan ganti rugi dan sengketa tata usaha di lingkungan angkatan bersenjata republik indonesia. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata dan berpuncak pada mahkamah agung sebagai pengadilan tertinggi. Pengadilan ini secara organisatoris dan administratif berada dibawah pembinaan panglima. Pembinaan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pengadilan dalam peradilan militer terbagi menjadi dua yaitu Pengadilan Militer dimana memeriksa dan memutus pada tingkat pertama, terdakwa merupakan prajurit berpangkat kapten kebawah diatur dalam Pasal 9 UU No 31 tahun 1997 yang harus diadili pengadilan militer. Selanjutnya Pengadilan Militer Tinggi, dimana Pengadilan ini juga memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata, juga memeriksa dan memutus tingkat pertama dan terakhir banding dari pengadilan militer dalam daerah hukumnya.

Dimana yang ketiga adalah Pengadilan Militer Utama yang memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan tata usaha angkatan bersenjata yang diputus pengadilan militer tinggi. Pengadilan ini juga memutus perbedaan pendapat antara Papera dan oditur mengenai diajukan atau tidak perlunya suatu perkara pada lingkungan peradilan umum atau peradilan militer. Selanjutnya yang terakhir adalah Pengadilan Pertempuran yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan terdakwa di daerah pertempuran. Dengan keberadaan Peradilan militer di Indonesia, diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran disiplin oleh anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Peradilan bukan hanya menjadi upaya represif, namun juga sebagai upaya preventif untuk mencegah adanya pelanggaran disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer.

Tindakan Insubordinasi atau melawan atasan dalam lingkungan peradilan militer adalah militer dalam tindakan nyata, dengan sengaja mengancam kekerasan terhadap atasan. Bagi prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut, dapat diberikan sanksi dan ditindak dengan tegas. Anggota TNI apabila melakukan tindak pidana akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sampai kemeja hijau. Berproses di meja hijau dilakukan oleh peradilan khusus yaitu peradilan militer, sama dengan peradilan negeri, peradilan militer juga terbuka untuk umum kecuali tindak pidana kesusilaan, namun jarang sekali masyarakat sipil yang hadir untuk mengikuti jalannya persidangan. Dilihat dari segi hukum, prajurit TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, bagaimanapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku baik hukum pidana, perdata, acara pidana dan acara perdata, perbedaannya

hanya karena adanya tugas dan kewajibanyang lebih khusus dari pada warga negara biasa terutama dalam hal yangberhubungan dengan pertahanan negara.⁵

Dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang- undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 7 yang berbunyi :

“Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, memepertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”.

Pada penelitian ini penulis meneliti adanya sebuah tindakan insubordinasi yang dilakukan oleh Terdakwa Koptu Suparman terhadap atasan, sehingga Koptu Suparman dinilai melakukan sebuah tindakan pidana sehingga diadili didalam Pengadilan Militer, Pengadilan Tinggi Militer bahkan sampai Mahkamah Agung. Hal tersebut dilakukan oleh Koptu Suparman dengan kasus posisi sebagai berikut:

Pada tanggal 27 Juni 2015, Terdakwa yang bertempat di Kompi Markas Yonif-200/Raider yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak Pidana Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, mengancam dengan kekerasan terhadap atasan. Kemudian di hari yang sama, pada saat Saksi-1 (LettuInf Ahmad Taufik) selesai mengambil apel pemberangkatan ijin bermalam di lapangan Kompi Markas Yonif-200/Raider, Terdakwa yang baru selesai menjalani hukuman di Masmil Cimahi menghadap Lettu Inf Ahmad Taufik untuk menanyakan laporan isteri Terdakwa a.n. Sdri. Fiska Gusti (Saksi-5) tentang kiriman kiriman SMS cabul dari orang yang tidak dikenal. namun menurut pengakuan Saksi-5 kepada Terdakwa, bahwa laporannya

⁵Moch Faisal Salam, **Peradilan Militer Indonesia**, Mandar Maju,Bandung, 1994, hlm15.

tidak ditanggapi oleh Lettu Inf Ahmad Taufik sehingga Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk mengajak Saksi-5 ke Kima Yonif-200/Raider agar permasalahannya jelas, karena Lettu Inf Ahmad Taufik merasa tidak pernah menerima laporan dari Saksi-5 tentang kiriman-kiriman SMS cabul dari orang-orang yang tidak dikenal. Pada saat Terdakwa menghadap Saksi-1 (Lettu Inf Ahmad Taufik), Lettu Inf Ahmad Taufik beranggapan bahwa Terdakwa melawan perintah dari dirinya, kemudian Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk jungkirnamun ditolak. Sehingga timbul perselisihan diantara terdakwa dan Lettu Inf Ahmad Taufik yang mengakibatkan pipi kiri terdakwa ditampar oleh Lettu Inf Ahmad Taufik. Lettu Inf Ahmad Taufik melihat Terdakwa menunjukkan sikap menantang dengan cara membuka kopel, dan baju dinas dan beranggapan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Insubordinasi yaitu *“Militer yang sengaja mengancam kekerasan terhadap atasan”*⁶

Apabila peneliti melihat dari kasus posisi diatas maka tidak seharusnya Koptu Suparman mendapatkan perilaku yang sedemikian dari atasannya. Hal ini dikarenakan jiwa korsa didalam militer sangatlah kuat sehingga kericuhan di dalam anggota militer merupakan salah satu cara untuk memupuk jiwa korsa antar prajurit agar tegar dan kuat ketika diluar nantinya menghadapi musuh yang nyata. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti yang seterusnya dituliskan kedalam sebuah tugas akhir berupa skripsi dengan judul :

⁶dikutip dari Pengadilan Militer Tinggi I Medan, “Putusan Nomor 51-K/PMT-I/BG/AD/IV/2016, hlm 1.

“Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/MIL/2016).”

Berikut penulis jabarkan mengenai penelitian yang pernah dibuat sebelumnya sebagai bentuk keorisinalitasan, sebagaimana ada di dalam tabel orisinalitas dibawah ini:

No	Tahun	Identitas Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2008	Natalia Mayasari, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Angkatan 2004	Penerapan Alat Bukti Pada Proses Penyelesaian Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Kasus Di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)	1. Bagaimana penerapan alat bukti pada proses penyelesaian tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI dalam lingkungan peradilan Militer? 2. Apa saja hambatan yang timbul pada penerapan alat bukti pada proses penyelesaian tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI dan bagaimana solusinya?	Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penerapan alat bukti pada proses penyelesaian tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI, sedangkan peneliti berfokus pada dasar pertimbangan hukum hakim didalam menjatuhkan amar putusan didalam tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI.
2.	2013	Adis Nevi Yuliani, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Angkatan 2009	Tinjauan Penanganan Kasus Insubordinasi Oleh Anggota Tentara Negara Indonesia (Studi Kasus Pengadilan Militer Iii-16 Makassar No: Put/136-K/Pm Iii-16/Ad/Viii/2012)	1. Bagaimana penerapan Hukum Pidana Materiil dalam penyelesaian tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI di Pengadilan Militer III - 16 Makassar? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI di Pengadilan Militer	Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penanganan kasus tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI pada peradilan militer saja, sedangkan peneliti berfokus pada dasar pertimbangan hukum hakim didalam menjatuhkan amar putusan didalam tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota

				III - 16 Makassar ?	TNI sudah sampai tingkatkasasi di Mahkamah Agung.
--	--	--	--	---------------------	---

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah yang dilakukan terdakwa koptu superman merupakan tindak pidana insubordinasi dalam lingkungan peradilan militer?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang memutus perkara dengan nomor : 252 K/MIL/2016 terhadap terdakwa koptu superman?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan Perumusan Masalah yang telah ada, maka terdapat beberapa Tujuan Penelitian, yakni:

1. Mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa koptu superman merupakan tindak pidana insubordinasi dalam lingkungan peradilan militer atau bukan merupakan tindak pidana insubordinasi.
2. Mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang memutus perkara dengan nomor : 252 K/MIL/2016 terhadap terdakwa koptu superman.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum acara pidana militer.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum acara pidana militer terutama yang berhubungan dengan tindak pidana insubordinasi.

Manfaat Praktis

1. Bagi aparat militer :
Penelitian ini dapat memberikan penjelasan atau wacana baru kepada TNI terkait perbedaan tindak pidana insubordinasi dan pelanggaran disiplin militer.
2. Bagi masyarakat :
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mengetahui pengertian tindak pidana insubordinasi dan pelanggaran disiplin militer dalam lingkungan peradilan militer.
3. Bagi peneliti :
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wacana di dalam mengatasi berbagai permasalahan tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh aparat militer.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Tindak Pidana Militer

1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Militer

1.1 Pengertian Militer

Kata “*militer*” berasal dari kata “*miles*” dalam bahasa Yunani berarti orang yang bersenjata yang siap untuk bertempur, yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara. Ciri-ciri militer ialah mempunyai organisasi yang teratur, mengenakan pakaian yang seragam, mempunyai disiplin serta mentaati hukum yang berlaku didalam peperangan. Apabila ciri-ciri tersebut diatas tidak dipenuhi, maka kelompok itu tidak dapat disebut militer atau lebih tepat disebut gerombolan bersenjata. Dipandang dari segi hukum, maka anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, perdata, acara pidana dan acara perdata. Perbedaan hanya karena adanya beban kewajiban yang lebih banyak daripada warga negara biasa dalam hal berhubungan dengan pertahanan negara, walaupun pada hakikatnya setiap warga negara wajib ikut serta membela negara sebagaimana tercantum dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi pembelaan atau pertahanan negara ini dilakukan angkatan bersenjata sebagai intinya. Sehingga tugas pokok angkatan bersenjata adalah mempertahankan kedaulatan negara dan kewibawaan pemerintah

dengan melakukan pertempuran-pertempuran dengan musuh, baik dari dalam maupun dari luar negeri dalam rangka menegakkan keamanan dalam negeri.⁷

Peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang berlaku bagi militer antara lain ialah:⁸ Undang-undang wajib militer (Undang-undang Nomor 66 Tahun 1958 L.N.No. 117/1958), Undang-undang militer sukarela (Undang-undang Nomor 19 Tahun 1950 LN.60/58), Peraturan Disiplin Tentara (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1949), Peraturan penghormatan tentara, Kitab undang-undang hukum disiplin militer.

1.2 Pengertian Hukum Pidana Militer

Hukum pidana militer memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum pidana umum dan hanya berlaku juga bagi golongan khusus (militer) atau orang-orang karena peraturan ditundukkan padanya. Dengan adanya hukum pidana militer, bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku bagi militer. Akan tetapi bagi militer berlaku baik hukum pidana umum maupun hukum pidana militer. (Pasal 1 KUHPM)

Diperlukan hukum khusus bagi anggota militer, karena untuk pelanggaran tindak pidana tertentu ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan kalau hanya berlaku hukum pidana umum misalnya pencurian yang dilakukan oleh militer didalam kesatuan militer. Jika kejahatan tersebut dimasukkan ke dalam KUHP akan membuat KUHP sulit dipergunakan. karena terhadap ketentuan-ketentuan ini hanya tunduk sebagian kecil dari anggota masyarakat juga peradilan yang berhak mengadilinya juga tersendiri yaitu pengadilan militer.⁹

⁷Moch.Faisal Salam, **Peradilan Militer Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 1994, Hlm.

⁸*Ibid*, Hlm.17-24

⁹*Ibid*, hlm 34.

1.3 Pengertian Hukum Acara Pidana Militer

Hukum acara pidana erat sekali kaitannya dengan hukum pidana bahkan dalam pengertian sehari-hari sering disebut hukum pidana. Perbedaannya adalah hukum pidana merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan pidana disebut hukum pidana materiil. Sedangkan hukum acara pidana adalah kumpulan pengaturan yang mengatur bagaimana caranya si pelaku tindak pidana supaya dapat dihukum disebut hukum pidana formil.¹⁰

Hukum acara bagi anggota militer di samping berlaku hukum acara pidana umum, berlaku juga hukum pidana khusus yaitu hukum acara pidana militer. Hukum acara pidana militer diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1950, dimana di dalam pasal 2 menyebutkan bahwa bagi hukum acara pidana pada peradilan militer berlaku sebagai pedoman HIR dengan perubahan-perubahan. Dengan dicabutnya HIR, maka kata HIR pada pasal-pasal undang-undang nomor 6 tahun 1950 tersebut harus dibaca KUHAP sebagai pedoman. Pengertian kata “pedoman” dalam pasal 2 Undang-undang nomor 6 tahun 1950 adalah ketentuan-ketentuan KUHAP diterapkan dalam lingkungan peradilan militer untuk materi atau hal-hal yang tidak diatur dalam hukum acara pidana militer dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan asas-asas pokok yang terdapat dalam hukum acara pidana militer. Walaupun terdapat aturan baru yang diatur di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana dan tidak diatur dalam hukum acara pidana militer, maka kalau peraturan itu diberlakukan kepada militer dikhawatirkan akan melanggar asas kesatuan komando (unity of

¹⁰*Ibid*, hlm 58.

command) dan asas hubungan atasan-bawahan sebagaimana terdapat dalam undang-undang nomor 6 tahun 1950.¹¹

1.4 Pengertian Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang subjek hukumnya kalangan militer, dan sifatnya khusus untuk militer. Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana militer apabila seorang militer melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang berlaku. Dikatakan tindak pidana militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai suatu tindak pidana.¹²

1.5 Subjek Tindak Pidana Militer

Subjek tindak pidana adalah setiap orang yang dapat dibebani tanggung jawab pidana atas apa yang dirumuskan pada UU yang berlaku¹³. Subjek dari tindak pidana biasanya adalah manusia sebagaimana yang dirumuskan dalam UU Hukum Pidana, dan UU lain dengan makna kata “Barang siapa”¹⁴, tetapi dalam perkembangannya subjek tindak pidana selain manusia juga korporasi. Menurut pengertiannya korporasi adalah “Kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan baik merupakan badan hukum ataupun bukan.”¹⁵

¹¹*Ibid*, hlm 81.

¹²Herdjito, **Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi**, (penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan badan litbang diklat KUMDIL Mahkamah Agung), hlm 39.

¹³Frans Maramis, **Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 82.

¹⁴Teguh Prasetyo, **Hukum Pidana Materiil**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 54.

¹⁵Isnu Gunadi, Jonaedi Effendi (Ed) , **Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana**, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 50.

Pada kalangan militer seorang berstatus militer adalah subjek dari tindak pidana militer dan juga subjek dari tindak pidana umum. Maksudnya disini adalah, apabila terjadi suatu tindak pidana militer campuran, militer yang melakukan tindak pidana tersebut secara bersamaan merupakan subjek dari tindak pidana umum dan tindak pidana militer. Dapat di tarik pemahaman bahwa subjek dari tindak pidana militer hanyalah “Manusia” yang bisa dikatakan militer atau TNI, korporasi bukan termasuk subjek hukum militer.

1.6 Jenis Tindak Pidana Militer Pada Kalangan Militer

Dikenal dua kategori tindak pidana. Pertama tindak pidana militer murni, dan yang kedua adalah tindak pidana militer campuran. Berikut ini Penulis akan mengemukakan apa itu tindak pidana militer murni, dan tindak pidana militer campuran.

1.6.1 Tindak Pidana Militer Murni

Tindak pidana militer murni merupakan suatu tindakan yang terlarang atau diharuskan. Pada prinsipnya hanya dilanggar oleh seorang militer karena keadaannya bersifat khusus atau karena kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Disebutkan “Pada prinsipnya” karena uraian tindak pidana tersebut ada perluasan subjek militernya, contoh tindak pidana militer murni adalah:

- a. Seorang militer dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh, tanpa ada usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut atau diharuskan kepadanya (Pasal 73 KUHPM);
- b. Kejahatan Desersi (Pasal 87 KUHPM);
- c. Meninggalkan Pos Penjagaan (Pasal 118 KUHPM);

d. Melawan Atasan (Pasal 105 KUHPM)¹⁶

1.6.2 Tindak Pidana Militer Campuran

Tindak pidana campuran adalah tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan. Pada pokoknya tindak pidana semacam ini sudah ditentukan oleh Perundang-undangan, tetapi diatur lagi pada KUHPM atau dalam UU militer lainnya. Hal ini karena adanya suatu kekhasan dari militer itu sendiri.¹⁷ Contoh dari tindak pidana militer campuran, yaitu penganiayaan, pembunuhan, narkoba, KDRT, dan lain-lain, yang mana tindak pidana militer campuran ini dalam tindak pidananya bisa saja dilakukan oleh kalangan sipil. Maksud bisa saja disini dimana kalangan sipil juga ada yang melakukan tindak pidana tersebut, dan perbuatannya dilarang bahkan jelas dikenakan sanksi pada UU hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini berbeda ketika militer melakukan tindak pidana murni dimana tidak mungkin kalangan sipil melakukan tindak pidana seperti itu, karena hal itu merupakan khas dari militer.

B. Kajian Tentang Tindak Pidana Insubordinasi

1. Pengertian Tindak Pidana Insubordinasi

Menurut KUHP Dan KUHPM :

1.1 Tindak Pidana Insubordinasi Menurut KUHP

Tindak Pidana insubordinasi jauh lebih dahulu diatur oleh KUHP dibandingkan dengan KUHPM, tetapi yang diatur dalam KUHP hanyalah sebatas perbuatan tindak pidana yang dilakukan di atas kapal. Tindak pidana

¹⁶Herdjito, *Op.Cit*, hlm. 39-40.

¹⁷*Ibid.*, hlm 40.

insubordinasi dalam KUHP yang Penulis temukan termuat dalam Pasal 459, Pasal 460 dan Pasal 461 KUHP.

1.2. Tindak Pidana Insubordinasi Menurut KUHPM

a. Menurut Pasal 105 KUHPM

1) Militer Dengan Sengaja Melalui Tindakan Nyata Mengancam Dengan Kekerasan Terhadap Atasan

Tindakan nyata yang dilakukannya yaitu dengan dilihat keadaan saat pengancaman itu terjadi atau dilakukan. Dapat dilihat juga tujuan apa ancaman tersebut dilakukan. Bawahan prajurit TNI ini mengetahui betul karena perbuatannya itu merupakan ancaman yang keras terhadap atasannya. Tindakan nyata tersebut bisa dalam bentuk perbuatan dapat juga dengan mimik maupun isyarat. Dapat ditarik pemahaman bahwa pengertian dari tindakan nyata dengan suatu perbuatan itu dasarnya adalah sama, artinya apa yang diperbuat oleh seseorang tersebut merupakan bagian dari tindakan nyata, tetapi kekerasan beda artinya dengan perbuatan jahat. Kekerasan adalah sesuatu yang menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan kerugian bagi yang terancam, sedangkan dalam perbuatan jahat tidak perlu adanya suatu tenaga. Ancaman langsung adalah dengan mengepalkan tangan dengan maksud untuk suatu saat akan meninju atasan. Ancaman tidak langsung misalkan mengarahkan senjata api yang sudah terisi kepada atasannya tersebut.

2) Dilakukan Tindak Pidana Di Dalam Dinas

Dalam dinas maksudnya yaitu saat prajurit TNI tersebut melakukan insubordinasi pada saat waktu dinas, atau disaat waktu dinas tersebut belum berakhir di kesatuan dimana tempat ia berdinas.

b. Menurut Pasal 106 KUHPM

Ada beberapa hal penting yang harus dicatat didalam Pasal ini, mengenai jenis tindak pidana insubordinasinya, yaitu:

1) Militer dengan sengaja karena tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan.

2) Merampas kemerdekaannya untuk bertindak atau memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan dan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas.

c. Menurut Pasal 107 KUHPM

Insubordinasi ini dilakukan dengan tindakan nyata dan yang direncanakan terlebih dahulu. Jelas disini bahwa orang yang bersangkutan menghendaki suatu waktu merencanakan suatu perbuatannya dikemudian hari dan mengetahui akibat yang akan terjadi dari perbuatannya itu.

Menurut *Simons*, bahwa:

Perencanaan terlebih dahulu itu ada, apabila untuk menentukan keputusannya dalam melakukan perbuatan itu telah dipertimbangkan secara tenang oleh petindak dalam tenggang waktu sebelumnya, dan telah diperhitungkan hakekat dan akibat dari perbuatan itu. Tentang pendek dan panjangnya jangka waktu menentukan pengambilan keputusan bukan termasuk dalam suatu hitungan dalam perencanaan terlebih dahulu.¹⁸

¹⁸*Simons dalam Ibid., hlm 347.*

d. Menurut Pasal 108KUHPM

Insubordinasi yang dilakukan dengan dua orang atau lebih secara bersatu. Pelaku terhadap kejahatan ini harus dua orang atau lebih secara bersatu. Bentuk pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku peserta adalah sama termasuk dalam hal akibat-akibat dari kejahatannya tersebut apabila untuk hal itu mereka telah bekerja sama. Secara bersatu adalah yang mempersatukan para petindak. Hal ini dapat dilihat dari unsur kejiwaannya masing-masing, contohnya si A menempeleng atasannya dan B tidak menempeleng tetapi memegang Atasannya itu agar tidak melawan.¹⁹

e. Menurut Pasal 109 KUHPM

Insubordinasi yang dilakukan adalah pada saat keadaan perang yang mana disaat negara sedang dalam keadaan genting yang dilakukan dengan perbuatan tindakan nyata. Perbuatan tindakan nyata ini artinya adalah sebagaimana Penulis terangkan sebelumnya, insubordinasi dalam keadaan perang merupakan tindak pidana yang dirasakan paling berat yang oleh seorang prajurit TNI, dan ancaman yang diberikan

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Insubordinasi

Kecenderungan perilaku pelanggaran tindak pidana dipengaruhi oleh dua macam faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalam individu prajurit meliputi kondisi fisik dan psikologis, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor lingkungan diluar individu prajurit.

¹⁹*Ibid.*, hlm 348.

Berikut faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi prajurit dalam melakukan tindak pidana insubordinasi.

2.1 Faktor Internal

Keimanan Dan Ketaqwaan Faktor internal yang mempengaruhi kecenderungan perilaku tindak pidana selain tipe kepribadian adalah keimanan dan ketaqwaan prajurit kepada Tuhan Yang Maha Esa (Allah S.W.T). Masalah keimanan dan ketaqwaan merupakan aspek esensial yang berpengaruh terhadap sikap, perilaku dan tindakan prajurit dalam kehidupannya sehari-hari. Prajurit yang mempunyai dasar keimanan dan ketaqwaan yang kuat yang ditandai dengan ketaatan dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya mempunyai kecenderungan lebih taat terhadap aturan yang berlaku. Dengan tidak adanya rasa keimanan dan ketaqwaan maka seorang prajurit TNI itu dapat melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Landasan iman merupakan hal yang penting agar seorang prajurit TNI.

Pemahaman Terhadap Hukum Pada beberapa kasus tindak pidana insubordinasi yang dilakukan prajurit TNI, ditemukan bahwa mereka kurang dalam pemahaman terhadap hukum. Mereka masih beranggapan sebagai warga negara kelas satu yang mempunyai keistimewaan hukum sehingga menganggap remeh supremasi hukum yang diwakili lembaga lembaga, POM, Oditur dan Hakim Militer. Ada kecenderungan seorang prajurit TNI hanya takut atau taat terhadap komandannya sehingga POM dan aparat penegak hukum lainnya diancam untuk tidak mengungkap kasus pelanggaran yang dilakukannya.

2.2 Faktor Eksternal

Peran Kepemimpinan Peran pemimpin dalam organisasi atau satuan sangat penting karena kualitas kepemimpinan menentukan kualitas kehidupan sebuah komunitas termasuk sebuah kesatuan. Satuan yang dipimpin seorang leader yang berbobot akan menjadi satuan yang berbobot pula. Kepemimpinan seorang komandan satuan memberikan andil yang besar bagi penegakkan disiplin di satuan sehingga mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran anggota. Pemimpin yang baik merupakan segala-galanya bagi prajurit yang baik. Seorang komandan atau pemimpin yang tidak konsekuen atas apa yang diucapkannya dan tidak bertanggungjawab akan membuat anak buah kehilangan tempat berpegang dan mengalami konflik, sehingga akan berpengaruh terhadap terjadinya penyimpangan dan tindak pidana oleh prajurit. Tidak semua pemimpin menerapkan sistem kepemimpinan yang baik, kebanyakan dari mereka menganggap bahwa dirinya sebagai senioritas yang harus dihormati. Segala perilaku dan tindakan yang dilakukan olehnya dilakukan dengan semena-mena sehingga menimbulkan konflik terhadap bawahannya. Hal inilah yang menjadi pemicu tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit TNI.

Situasi Lingkungan Kerja Dan Pangkalan Lingkungan kerja yang dinamis dan pangkalan yang teratur dan bersih berpengaruh terhadap sikap seseorang. Situasi kerja yang monoton dan pangkalan yang sepi dan tidak teratur akan sangat menjemukan sehingga mendorong prajurit memasuki situasi yang menekan (stress) dan berpengaruh terhadap moral prajurit.

Beban tugas yang melebihi kemampuan fisik dan mental seseorang dapat memicu timbulnya tingkat stress yang apabila tidak mendapat perhatian dan penanganan akan menimbulkan terjadinya tindak pidana. Kasus insubordinasi

prajurit disatukan salah satunya disebabkan oleh adanya beban tugas yang diluar kemampuan fisik dan mental psikologis prajurit yang bersangkutan, sehingga berdampak terjadinya tindak pidana insubordinasi. Seringkali prajurit TNI yang dibebani tugas berat sedangkan tugas yang lainnya belum diselesaikan. Hal ini menimbulkan pemberontakan dan rasa tidak nyaman pada diri prajurit TNI, sehingga timbul pemberontakan yang akhirnya terjadi perlawanan terhadap seorang atasan (insubordinasi).

C. Kajian Tentang Kewenangan Hakim

1. Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UUD No.48/2009). Berhakim berarti minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana. Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandiriaperadilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3 Undang-Undang No.48 Tahun 2009).

2. Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 Ayat (9) KUHAP). Ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum maka jika aturan hukum tidak ada ia harus menggantinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkan dan jika tidak ada aturan hukum tertulis ia dapat menggunakan hukum adat.

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 5 Undang-Undang No.48 Tahun 2009).Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang

sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. (pasal 17 Ayat (3-5) Undang-Undang No.48 Tahun 2009).

Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHP). Di dalam praktik adakalanya hakim menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkannya atau ditanyakan hakim. Hakim ketua membuka sidang dengan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Jika hakim dalam memeriksa perkara menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh terdakwa atau saksi dan mereka tidak bebas memberikan jawaban, dapat berakibat putusan batal demi hukum.

3. Peran Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain, ia harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukum untuk bertanya kepada saksi saksi, begitu pula Penuntut Umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.²⁰

Ada lima hal menjadi tanggung jawab Hakim yaitu :²¹

²⁰Andi Hamzah, **KUHP Dan KUHP**, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm 101.

²¹Nanda Agung Dewantoro, **Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana**, PT Aksara Persada, Jakarta, 1987, hlm 149.

- 1) Justisialis Hukum; yang dimaksud justisialis adalah meng-adilkan. Jadi putusan Hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan *doel matigheid* perlu di-adilkan. Makna dari hukum *de zin van het recht* terletak dalam *gerechtigheid* keadilan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab jurist yang terletak dalam justisialisasi daripada hukum.
- 2) Penjiwaan Hukum; dalam berhukum *recht doen* tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.
- 3) Pengintegrasian Hukum; hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan daripada hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan Hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hukum dapat diintegrasikan dalam hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju ke pemulihan pada posisi asli *restitutio in integrum*.
- 4) Totalitas Hukum; maksudnya menempatkan hukum keputusan Hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, di bawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial, sebaliknya di atas Hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh Hakim dalam keputusan hukumnya, di

saat itu juga segi sosial-ekonomis menuntut pada Hakim agar keputusannya memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial-ekonomis.

- 5) Personalisasi Hukum; personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan pada personal (kepribadian) dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia yang berpribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memunculkan tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung), di sini hakim dipanggil untuk bisa memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandangnya sebagai pribadi yang mencari keadilan.

Ketika hakim dihadapkan oleh suatu perkara, dalam dirinya berlangsung suatu proses pemikiran untuk kemudian memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :²²

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah serta dapat dipidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, yaitu terdakwa memang dapat dipidana.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari memeriksa dan kesaksian dalam sidang pengadilan (Pasal 188 Ayat (3) KUHP), sesudah itu hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang

²² Sodarto, op.cit., hal.74

didasarkan atas surat dakwaan dan didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang telah terbukti dalam pemeriksaan sidang.

4. Tugas Dan Wewenang Hakim Dalam Proses Peradilan

1) Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya yaitu : (1) lingkungan peradilan umum; (2) lingkungan peradilan agama; (3) lingkungan peradilan militer; (4) lingkungan peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 2 UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

2) Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan. Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Berbicara tentang masalah tujuan putusan bebas didalam sistem peradilan pemeriksaan perkara pidana, hal ini tidak terlepas dari tujuan hukum itu sendiri sebagai alat yang dipakai untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara. Sehingga bilamana suatu hukum atau Undang-undang tidak mempunyai tujuan, tentunya acara pegakan hukum dan hak-hak asasi manusia pun akan berjalan dengan suatu ketidakpastian. Oleh sebab itulah di dalam mencapai suatu tujuan tersebut kuncinya terletak pada aparat hukum itu sendiri. Sejalan dengan tugas hakim seperti dijelaskan diatas yakni kemampuan untuk menumbuhkan putusan-putusan atau yang dapat diterima masyarakat. Apalagi terhadap penjatuhan putusan bebas yang memang banyak memerlukan argumentasi konkrit dan pasti, kiranya pantaslah status hakim sebagaimana ditentukan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka

untuk menyelenggarakan negara hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum dan keadilan berdasarkan hukum Indonesia.

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau ditetapkan lewat putusan. Dan didalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya. Dasar pertimbangan hakim harus berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta unsur-unsur pasal tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa. Karena putusan yang dibuktikan adalah sesuaidengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selain itu juga dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa harus berdasarkan keterangan ahli (surat *visum et repertum*), barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, pada saat persidangan terdakwa berperilaku sopan, terdakwa belum pernah di hukum, terdakwa mengakui semua perbuatannya dan apa yang diutarakan oleh terdakwa atau saksi benar adanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Unsur-unsur pasal Pasal 284 ayat (1) KUHP, Pasal 285 KUHP, Pasal 286 KUHP, Pasal 287 (1) KUHP, 289 KUHP, 290 KUHP, 294 (1) KUHP serta dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terpenuhi. Jadi berdasarkan hal-hal di atas

hakim bisa menjatuhkan hukuman yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

D. Kajian Tentang Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.²³ Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan.²⁴ Walaupun surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, tetapi hakim tidak terikat kepada surat dakwaan tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan :“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.²⁵ Dengan demikian yang menjadi

²³ Pasal 1 butir 11 KUHAP.

²⁴ Andi Hamzah, **Pengantar Hukum Acara Pidana**, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm 167.

²⁵ Pasal 183 KUHAP.

syarat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap suatu perkara pidana adalah :

- 1) Adanya alat bukti yang cukup dan sah.
- 2) Adanya keyakinan hakim.

Mengenai alat bukti yang sah, ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP bahwa:

1) Alat bukti yang sah yaitu:²⁶

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Keterangan terdakwa.

2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Menurut Andi Hamzah,²⁷ ada 5 (lima) hal yang menjadi tanggung jawab dari seorang hakim, yaitu:

a) Justisialis hukum

Yang dimaksud justisialis adalah mengadilkan. Jadi putusan hakim yang dalam prakteknya memperhitungkan kemanfaatan (*doel matigheld*) perlu diadilkan. Makna dari hukum (*dezin van het recht*) terletak dalam justisialisasi dari pada hukum.

b) Penjiwaan hukum

²⁶ Pasal 184 KUHAP.

²⁷ Andi Hamzah, **Pengantar Hukum Acara Pidana**, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm 101.

Dalam ber hukum (*recht doen*) tidak boleh merosot menjadi sesuatu adat yang hampa dan tidak berjiwa, melainkan harus senantiasa diresapi oleh jiwa untuk ber hukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.

c) Pengintegrasian hukum

Hakim perlu senantiasa sadar bahwa hukum dengan kasus tertentu merupakan ungkapan hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadilkan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hakim dapat diintegrasikan dalam sistem hukum positif sehingga semua usaha ber hukum senantiasa menuju ke pemulihan kepada posisi asli (*restitution in integrum*).

d) Totalitas hukum

Maksudnya menempatkan hukum keputusan hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari segi hukum, dibawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial sebaliknya diatas hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian.

e) Personalisasi hukum

Personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan kepada personal (kepribadian) dari pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia sebagai pribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memuncaklah tanggung

jawab hakim sebagai pengayom (pelindung) disini hakim dipanggil untuk bias memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandangnya sebagai kepribadian yang mencari keadilan.

2. Macam-macam Putusan Di Pengadilan

Hakim dalam menjalankan tugasnya dipersidangan harus berpedoman pada regulasi yang berlaku bagi hakim, diantaranya Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sehingga dalam menjatuhkan putusannya memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan. Hal di atas sebagaimana tercantum di dalam Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan tugas dan kewajiban hakim sebagai berikut:

Pasal 5 menentukan:

- 1) *Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;*
- 2) *Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum;*
- 3) *Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Hakim.*

Pasal 10 menentukan:

- 1) *pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili;*
- 2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.*

Menurut ketentuan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHP), putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa

terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan rumusan KUHAP tersebut putusan hakim dapat digolongkan ke dalam 2 jenis yaitu:

2.1 Putusan Akhir

Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Maksud dari pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis kepada terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan serta pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

2.2 Putusan Sela

Putusan yang bukan putusan akhir ini mengacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/ penuntut umum. Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwadan penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan tetapi, secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Putusan sela ini bukan putusan akhir karena disamping memungkinkan perkara tersebut secara material dibuka kembali karena adanya perlawanan yang dibenarkan, juga dikarenakan dalam hak ini materi pokok

perkara atau pokok perkara yang sebenarnya yaitu dari keterangan para saksi, terdakwa serta proses berikutnya belum diperiksa oleh majelis hakim.²⁸ Jadi, bentuk putusan yang dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Menurut penilaian majelis hakim mungkin saja apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai, apa yang didakwakan memang benar terbukti akan tetapi apa yang didakwakan bukan m

erupakan tindak pidana, tapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan atau menurut penilaian hakim tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti samasekali. Bertitik tolak dari kemungkinan-kemungkinan tersebut putusan yang dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara dapat berbentuk :

2.2.1 Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan yang menyatakan terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Dibebaskan dari tuntutan hukum berarti terdakwa dibebaskan dari pemidanaan atau dengankata lain tidak dipidana. Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHP, terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum apabila pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis Menurut Yahya Harahap

²⁸*Ibid.*, hlm.47.

ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.²⁹ Maksud tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah bahwa pembuktian yang diperoleh dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian adalah untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti.

2.2.2 Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

2.2.3 Putusan Pemidanaan

Penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan hal ini sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa atau dengan penjelasan lain. Pengadilan berpendapat dan menilai apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal

²⁹M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 131.

183 KUHAP. Kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya. Putusan hakim dapat dieksekusi bila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah diterima oleh para pihak yang bersangkutan.

2.2.4 Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Pasal 156 ayat (1) KUHAP, tidak menjelaskan pengertian dakwaan tidak dapat diterima, dan tidak dijelaskan patokan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Menurut Yahya Harahap pengertian tentang dakwaan tidak dapat diterima adalah apabila dakwaan yang diajukan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara. Kekeliruan tersebut dapat mengenai orang yang didakwa, ataupun mengenai susunan surat dakwaan.

2.2.5 Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Menurut Pasal 143 KUHAP syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan adalah harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil, yaitu :

a) Syarat formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan:

- 1) Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa/ penuntut umum.
- 2) Nama lengkap, tempat tinggal, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

b) Syarat materiil

- 1) Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
- 2) Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum adalah apabila tidak memenuhi unsur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yaitu tidak memenuhi syarat materiil diatas.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif). Penelitian Hukum Normatif adalah Jenis penelitian yang mana mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai bahan hukum primer seperti Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan Pengadilan, Teori Hukum, dan dapat pula berupa pendapat para sarjana atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Tahapan pertama penelitian Hukum Normatif adalah Penelitian yang mana ditujukan untuk mendapatkan Hukum Obyektif (Norma Hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap permasalahan hukum yang ada tersebut. Kemudian tahapan kedua penelitian Hukum Normatif adalah Penelitian yang mana ditujukan untuk mendapatkan Hukum Subtektif (Hak dan Kewajiban).

Dalam hal ini sudah sangat jelas apabila penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) yang mana pada intinya hendak mengkaji suatu putusan Pengadilan Mulai dari Tingkat Pertama hingga Kasasi.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu metode atau cara mengadakan penelitian.³⁰Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan-pendekatan. Dengan pendekatan yang dipilih, peneliti akan mendapatkan keterangan/informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum atau permasalahan yang dicari jawaban

³⁰Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**, Rienike Cipta, Jakarta, 2002, hlm 23.

yang tepat dan benar³¹. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa pendekatan yaitu sebagai berikut :

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Peraturan perundang-undangan atau biasanya disebut dengan istilah *statuta approach* merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang atau pejabat yang berwenang dan peraturan yang dibuat mengikat secara umum tanpa terkecuali. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan secara singkat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statue* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan lesgislati dan regulasi.³²

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan peneliti dengan mengidentifikasi dan mengkaji Putusan Pengadilan (yang mana merupakan suatu peraturan mengikat bagi pihaknya) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait tindak pidana korupsi. Putusan terebut dianalisis dan dikaitkan dengan peraturan yang berlaku.

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mentelaah pada kasus – kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji dalam setiap putusan tersebut adalah dasar pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Pustaka Media Group, Jakarta, 2010, hlm 93.

³² *Ibid.*, hlm 97.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Secara Umum di dalam jenis Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) diperlukan jenis dan bahan Hukum Guna menunjang dan sebagai sumber acuan di dalam penelitiannya. Terdapat 3 jenis Bahan Hukum di dalam Penelitian Hukum Normatif, yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas putusan-putusan hakim, peraturan dan risalah pembuatan perundang-undangan, dan catatan-catatan resmi.³³ Adapun bahan hukum primer adalah ketiga putusan pengadilan dalam tingkat pertama, banding dan kasasi, KUHPM, KUHP, KUHP, dan UU tentang TNI.

- 1) Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Pasal 105 s/d 109 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- 4) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
- 5) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- 6) Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Negara Indonesia

b) Bahan Hukum Sekunder

³³ Peter Mahmud Marzuki, *ibid.*, hlm 141.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan bagi penulis terhadap bahan hukum primer yang telah dipilih.³⁴ Bahan-bahan hukum sekunder dapat berupa semua publikasi baik secara *softcopy* maupun *hardcopy* tentang hukum yang merupakan terbitan dari dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buk atau teks yang dibukukan, jurnal hukum baik dalam bentuk media cetak maupun dalam bentuk elektronik atau internet. Bahan sekunder yang dibutuhkan peneliti berkaitan dengan isu hukum yang peneliti angkat yaitu tentang tindak pidana insubordinasi.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan yang mampu menerangkan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya : Kamus, Ensiklopedia.³⁵ Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan penulis yang merujuk pada Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik Penelusuran Bahan Hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran secara studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan pada Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Kota Malang. Penelusuran studi kepustakaan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana insubordinasi. Sedangkan bahan sekunder dilakukan dengan *study literature* dari buku-buku, artikel, atau artikel dan jurnal

³⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan 14-Juni 2012, hlm 13.

³⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid*, hlm 13.

yang ada di internet atau media cetak yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisis Bahan Hukum menggunakan interpretasi gramatikal. Metode interpretasi menurut bahasa (gramatikal) yaitu suatu cara penafsiran yang menafsirkan Undang-undang menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat pada undang-undang. Hakim wajib menilai arti kata yang lazim dipakai dalam bahasa sehari-hari yang umum. Syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penafsiran menurut bahasa ini adalah penjelasan itu harus bersifat logis, oleh karenanya metode ini juga disebut metode objektif.³⁶ Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa isi atau kandungan dari Putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi, kemudian menguraikan dalam bentuk paragraf-paragraf dan dihubungkan dengan bahan-bahan hukum yang ada, sehingga mampu menjawab permasalahan yang peneliti angkat.

F. Defini Konseptual

1. Tindak Pidana Insubordinasi

Tindak Pidana Insubordinasi dalam penelitian ini ialah Tindak Pidana Insubordinasi yang dilakukan oleh terdakwa Koptu Suparman terhadap atasannya Lettu.Inf Ahmad Taufik dalam lingkungan militer

2. Analisis Putusan

³⁶Ahmad Rifai, **Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif**, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 40.

Analisis Putusan yang dimaksud ialah analisis putusan terkait kasus terdakwa Koptu Suparman yang melakukan Tindak Pidana Insubordinasi kepada atasannya yang mana putusan tersebut terdiri dari : Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 174-K/PM I-04/AD/XI/2016., Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 51-K/PMT-1/BDG/AD/2016., Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/MIL/2016



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Koptu Suparman Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Insubordinasi

Tindakan Insubordinasi atau melawan atasan dalam lingkungan peradilan militer adalah militer dalam tindakan nyata, dengan sengaja mengancam kekerasan terhadap atasan. Bagi prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut, dapat diberikan sanksi dan ditindak dengan tegas. Anggota TNI apabila melakukan tindak pidana akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sampai kemeja hijau. Berproses di kemeja hijau dilakukan oleh peradilan khusus yaitu peradilan militer, sama dengan peradilan negeri, peradilan militer juga terbuka untuk umum kecuali tindak pidana kesusilaan, namun jarang sekali masyarakat sipil yang hadir untuk mengikuti jalannya persidangan. Dilihat dari segi hukum, prajurit TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, bagaimanapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku baik hukum pidana, perdata, acara pidana dan acara perdata, perbedaannya hanya karena adanya tugas dan kewajiban yang lebih khusus dari pada warga negara biasa terutama dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan negara.³⁷

1. Uraian kasus / Posisi kasus

Pada tanggal 27 Juni 2015, Terdakwa yang bertempat di Kompi Markas Yonif-200/Raider yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04

³⁷Moch Faisal Salam, **Peradilan Militer Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 15.

Palembang, telah melakukan tindak Pidana Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, mengancam dengan kekerasan terhadap atasan.

Kemudian di hari yang sama, pada saat Saksi-1 (LettuInf Ahmad Taufik) selesai mengambil apel pemberangkatan ijin bermalam di lapangan Kompi Markas Yonif-200/Raider, terdakwa yang baru selesai menjalani hukuman di Masmil Cimahi menghadap Lettu Inf Ahmad Taufik untuk menanyakan laporan isteri Terdakwa a.n. Sdri. Fiska Gusti (Saksi-5) tentang kiriman kiriman SMS cabul dari orang yang tidak dikenal. namun menurut pengakuan Saksi-5 kepada terdakwa, bahwa laporannya tidak ditanggapi oleh Lettu Inf Ahmad Taufik sehingga Saksi-1 memerintahkan terdakwa untuk mengajak Saksi-5 ke Kima Yonif-200/Raider agar permasalahannya jelas, karena Lettu Inf Ahmad Taufik merasa tidak pernah menerima laporan dari Saksi-5 tentang kiriman-kiriman SMS cabul dari orang-orang yang tidak dikenal.³⁸

Pada saat terdakwa menghadap Saksi-1 (Lettu Inf Ahmad Taufik) , Lettu Inf Ahmad Taufik beranggapan bahwa terdakwa melawan perintah dari dirinya , kemudian Saksi-1 memerintahkan terdakwa untuk jungkirnamun ditolak. Sehingga timbul perselisihan diantara terdakwa dan Lettu Inf Ahmad Taufik yang mengakibatkan pipi kiri terdakwa ditampar oleh Lettu Inf Ahmad Taufik. Lettu Inf Ahmad Taufik melihat terdakwa menunjukkan sikap menantang dengan cara membuka kopel, dan baju dinas dan beranggapan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Insubordinasi yaitu ‘ *Militer yang sengaja mengancam kekerasan terhadap atasan* ’,³⁹

³⁸dikutip dari Pengadilan Militer Tinggi I Medan, “Putusan Nomor 51-K/PMT-I/BG/AD/IV/2016, hlm 1.

³⁹dikutip dari Pengadilan Militer Tinggi I Medan, “Putusan Nomor 51-K/PMT-I/BG/AD/IV/2016, hlm 2.

Penjelasan diatas adalah kronologi terdakwa koptu suparman yang dianggap oleh majelis hakim di Pengadilan Militer I-04 Palembang dan majelis hakim di Pengadilan Militer Tinggi Medan bahwa terdakwa koptu suparman melakukan tindak pidana insubordinasi dan dianggap memenuhi unsur dalam pasal 105 ayat (1) KUHPM yaitu "*Militer yang dengan sengaja mengancam kekerasan terhadap atasan*". Akan tetapi, majelis hakim Mahkamah Agung membebaskan terdakwa koptu suparman dan berpendapat bahwa terdakwa koptu suparman tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana insubordinasi sebagaimana yang didakwakan oditur militer dalam pasal 105 ayat (1) KUHPM.

2. Analisis Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Koptu Suparman

Tindak Pidana Insubordinasi Menurut 105 – 109 KUHPM mengatur secara khusus perbuatan tindak pidana insubordinasi antaranya:

a. Menurut Pasal 105 KUHPM

1) Militer Dengan Sengaja Melalui Tindakan Nyata Mengancam Dengan Kekerasan Terhadap Atasan

Tindakan nyata yang dilakukannya yaitu dengan dilihat keadaan saat pengancaman itu terjadi atau dilakukan. Dapat dilihat juga tujuan apa ancaman tersebut dilakukan. Bawahan prajurit TNI ini mengetahui betul karena perbuatannya itu merupakan ancaman yang keras terhadap atasannya. Tindakan nyata tersebut bisa dalam bentuk perbuatan dapat juga dengan mimik maupun isyarat. Dapat ditarik pemahaman bahwa pengertian dari tindakan nyata dengan suatu perbuatan itu dasarnya adalah sama, artinya apa yang diperbuat oleh

seseorang tersebut merupakan bagian dari tindakan nyata, tetapi kekerasan beda artinya dengan perbuatan jahat. Kekerasan adalah sesuatu yang menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan kerugian bagi yang terancam, sedangkan dalam perbuatan jahat tidak perlu adanya suatu tenaga. Ancaman langsung adalah dengan mengepalkan tangan dengan maksud untuk suatu saat akan meninju atasan. Ancaman tidak langsung misalkan mengarahkan senjata api yang sudah terisi kepada atasannya tersebut.

2) Dilakukan Tindak Pidana Di Dalam Dinas

Dalam dinas maksudnya yaitu saat prajurit TNI tersebut melakukan insubordinasi pada saat waktu dinas, atau disaat waktu dinas tersebut belum berakhir di kesatuan dimana tempat ia berdinas.

b. Menurut Pasal 106 KUHPM

Ada beberapa hal penting yang harus dicatat didalam Pasal ini, mengenai jenis tindak pidana insubordinasinya, yaitu:

- 1) Militer dengan sengaja karena tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan.
- 2) Merampas kemerdekaannya untuk bertindak atau memaksannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan dan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas.

c. Menurut Pasal 107 KUHPM

Insubordinasi ini dilakukan dengan tindakan nyata dan yang direncanakan terlebih dahulu. Jelas disini bahwa orang yang bersangkutan menghendaki suatu

waktu merencanakan suatu perbuatannya dikemudian hari dan mengetahui akibat yang akan terjadi dari perbuatannya itu.

d. Menurut Pasal 108KUHPM

Insubordinasi yang dilakukan dengan dua orang atau lebih secara bersatu. Pelaku terhadap kejahatan ini harus dua orang atau lebih secara bersatu. Bentuk pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku peserta adalah sama termasuk dalam hal akibat-akibat dari kejahatannya tersebut apabila untuk hal itu mereka telah bekerja sama. Secara bersatu adalah yang mempersatukan para petindak. Hal ini dapat dilihat dari unsur kejiwaannya masing-masing, contohnya si A menempeleng atasannya dan B tidak menempeleng tetapi memegang Atasannya itu agar tidak melawan.⁴⁰

e. Menurut Pasal 109 KUHPM

Insubordinasi yang dilakukan adalah pada saat keadaan perang yang mana disaat negara sedang dalam keadaan genting yang dilakukan dengan perbuatan tindakan nyata. Perbuatan tindakan nyata ini artinya adalah sebagaimana Penulis terangkan sebelumnya, insubordinasi dalam keadaan perang merupakan tindak pidana yang dirasakan paling berat yang oleh seorang prajurit TNI, dan ancaman yang diberikan tidak mainmain dengan sanksi yang berat pula. Kecenderungan perilaku pelanggaran tindak pidana dipengaruhi oleh dua macam faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalam individu prajurit meliputi kondisi fisik dan psikologis.

⁴⁰*Ibid.*, hlm 348.

Tindak pidana insubordinasi diatur dalam pasal 105 dan pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Perbedaan tindak pidana insubordinasi yang dilakukan anggota militer dalam pasal 105 dan pasal 106 KUHPM ialah apabila didalam pasal 105 KUHPM, adanya unsur mengancam dengan kekerasan. Unsur mengancam kekerasan bisa berupa anggota militer yang dengan sengaja mengancam atasannya disertai dengan adanya perbuatan atau bahasa isyarat. Namun didalam pasal 106 KUHPM unturnya ialah dengan sengaja menyerang seorang atasan disertai dengan perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka. Keduanya merupakan tindak pidana insubordinasi, perbedaannya hanya dalam hal perbuatan yang dilakukan anggota militer tersebut.

Dasar hukum tindak pidana insubordinasi diatur dalam pasal 105 ayat (1) KUHPM yang berbunyi *“setiap militer yang dengan sengaja mengancam kekerasan terhadap atasan dipidana dengan pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan”* Sedangkan pasal 105 ayat (2) KUHPM lebih mengatur perbuatan militer yang melakukan tindak pidana insubordinasi yang dilakukan didalam dinas, maka militer tersebut dipidana dengan pidana penjara maksimal 6 tahun. Pasal 105 KUHPM merupakan kejahatan mengancam dalam bentuk yang khusus, oleh karena didalam pasal 97 KUHPM dijumpai juga perbuatan mengancam akan tetapi sifatnya masih umum dan tidak merupakan pasal tersendiri mengenai ancaman. Yang diartikan dengan mengancam dengan tindakan yang disertai *“kekerasan”* ialah mengancam dengan kekerasan yang disertai dengan perbuatan atau bahasa isyarat. Bagaimana caranya pengancaman itu dilakukan, undang-undang sendiri tidak menentukannya. Yang diterangkan hanyalah, bahwa ancaman itu harus dilakukan dengan suatu tindakan tertentu. Misalnya dengan

mengacungkan tangan atau mengepalkan tangan didepan muka atasan, akan menusuk dengan pisau atau pedang yang sudah terasah, atau dengan membidik dengan senapan yang terisi kepada seorang atasan.. Kekerasan adalah tiap-tiap pemakaian tenaga atau alat, baik yang layak maupun yang tidak layak, yang sifatnya demikian kuat dan besarnya, sehingga kemungkinan untuk mengadakan perlawanan terhadap tenaga atau alat tadi tidak ada sama sekali. Jadi, kekerasan sebenarnya merupakan pengertian yang relatif. Artinya, tergantung kepada orang terhadap mana kekerasan itu ditujukan. Didalam pasal 105 KUHPM mengenai ancaman dengan kekerasan, tidak ditentukan didalam keadaan yang bagaimana ancaman itu harus dilakukan, misalnya didepan umum atau dilakukan dihadapan atasan itu sendiri. Sekalipun demikian, biasanya ancaman itu dilakukan dihadapan atasan yang diancam. Jadi, subyek dan obyek harus berhadapan secara langsung. Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 105 KUHPM tidak dapat diselesaikan melalui hukum disiplin tentara.⁴¹

Perbedaan antara pasal 97 KUHPM dengan pasal 105 KUHPM terletak di dalam isi daripada ancaman tersebut. Didalam pasal 97 KUHPM, perbuatan yang ditentukan dapat dihukum ialah yang mengancam dengan “*jahat*” kepada seorang atasan secara lisan, dengan perbuatan atau bahasa isyarat. Apabila di dalam pasal 105 KUHPM , perbuatan yang dapat dihukum adalah mengancam dengan kekerasan yang dilakukan dengan isyarat atau perbuatan.⁴²

Mengenai pengertian “*mengancam dengan jahat*” , isi dari ancaman itu harus memberikan kesan kepada orang yang diancam. Bahwa ancaman itu benar-

⁴¹Marjoto, **Penjelasan Pasal 105 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal**, Jakarta, 1958, hlm 141.

⁴²*Ibid*, hlm 142.

benar ada atau merupakan suatu ancaman, Suatu ancaman yang bersifat tidak sungguh-sungguh dan yang mungkin hanya untuk membuat lelucon saja, tentu tidak dapat dikenakan pasal 105 KUHPM.⁴³

Ancaman dengan kekerasan harus ditujukan kepada atasan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kekerasan yang ditujukan secara langsung ialah mengancam dengan kepalan tangan, pukulan serta tendangan. Sedangkan, kekerasan yang ditujukan secara tidak langsung ialah misalnya dengan melemparkan benda, tembakan, tusukan, dan perbuatan-perbuatan yang mempergunakan alat.⁴⁴

Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 97 KUHPM, pasal 99 KUHPM, dan pasal 105 KUHPM, semuanya harus dilakukan dengan sengaja. Anggota militer disini harus mengetahui bahwa perbuatan yang ditujukan itu kepada atasan. Didalam hal ini, tidak ada perbedaan antara atasan yang sedang berpakaian seragam dinas atau yang sedang tidak berpakaian seragam dinas, oleh karena yang terpenting disini adalah seorang anggota militer mengetahui jika yang dihadapannya adalah seorang atasan. Akan tetapi, apabila seorang anggota militer sama sekali tidak mengetahui bahwa seorang yang sedang tidak berpakaian seragam dinas adalah atasan, disebabkan karena atasan itu sendiri tidak memberitahukan kepada seorang anggota militer tersebut, maka seorang anggota militer tersebut tidak dapat dikenakan pasal 97 KUHPM, pasal 99 KUHPM, dan pasal 105 KUHPM. Tindak Pidana insubordinasi jauh lebih dahulu diatur oleh KUHP dibandingkan dengan KUHPM, tetapi yang diatur dalam KUHP hanyalah sebatas perbuatan tindak pidana yang dilakukan di atas kapal. Tindak pidana

⁴³*Ibid*, hlm 119.

⁴⁴*Ibid*, hlm 143.

insubordinasi dalam KUHP yang Penulis temukan termuat dalam Pasal 459, Pasal 460 dan Pasal 461 KUHP.

Menurut Pasal 459 KUHP Tindak pidana ini dinamakan tindak pidana insubordinasi dikarenakan seorang penumpang atau seorang kelasi dari suatu kapal negara Republik Indonesia mengancam atau menyerang nahkodahnya dengan kekerasan atau menahannya dengan maksud tertentu. Pasal 460 KUHP Insubordinasi ini dikatakan sebagai *Muiterij* atau dikatakan sebagai suatu “Pemberontakan” yang dilakukan yang pelakunya setidaknya dua orang atau lebih yang membuat nahkoda atau petugas kapal luka-luka atau bahkan sampai meninggal dunia. Apabila dalam Pasal 461 KUHP, Pelaku dari tindak pidananya adalah kelasi atau bisa dikatakan anak-anak kapal yang menghasut supaya melakukan pemberontakan, atau menghasut melakukan pemogokan-pemogokan aktifitas yang ada pada kapal.

Berikut faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi prajurit dalam melakukan tindak pidana insubordinasi:

Keimanan Dan Ketaqwaan Faktor internal lain yang mempengaruhi kecenderungan perilaku tindak pidana selain tipe kepribadian adalah keimanan dan ketaqwaan prajurit kepada Tuhan Yang Maha Esa (Allah S.W.T). Masalah keimanan dan ketaqwaan merupakan aspek esensial yang berpengaruh terhadap sikap, perilaku dan tindakan prajurit dalam kehidupannya sehari-hari. Prajurit yang mempunyai dasar keimanan dan ketaqwaan yang kuat yang ditandai dengan ketaatan dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya mempunyai kecenderungan lebih taat terhadap aturan yang berlaku. Dengan tidak adanya rasa keimanan dan ketaqwaan maka seorang prajurit TNI itu dapat melakukan suatu

perbuatan tindak pidana. Landasan iman merupakan hal yang penting agar seorang prajurit TNI. Pemahaman Terhadap Hukum Pada beberapa kasus tindak pidana insubordinasi yang dilakukan prajurit TNI, ditemukan bahwa mereka kurang dalam pemahaman terhadap hukum. Mereka masih beranggapan sebagai warga negara kelas satu yang mempunyai keistimewaan hukum sehingga menganggap remeh supremasi hukum yang diwakili lembaga POM, Oditur dan Hakim Militer. Ada kecenderungan seorang prajurit TNI hanya takut atau taat terhadap komandannya sehingga POM dan aparat penegak hukum lainnya diancam untuk tidak mengungkap kasus pelanggaran yang dilakukannya. Moril Moril prajurit yang rendah dapat dilihat dari beberapa indikasi. Salah satunya terjadinya masalah hambatan dan gangguan kejiwaan yang secara ilmiah disebut neuro-psychiatri yang menyebabkan terjadinya insubordinasi.

Peran Kepemimpinan Peran pemimpin dalam organisasi atau satuan sangat penting karena kualitas kepemimpinan menentukan kualitas kehidupan sebuah komunitas termasuk sebuah kesatuan. Satuan yang dipimpin seorang leader yang berbobot akan menjadi satuan yang berbobot pula. Kepemimpinan seorang komandan satuan memberikan andil yang besar bagi penegakkan disiplin di satuan sehingga mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran anggota. Pemimpin yang baik merupakan segala-galanya bagi prajurit yang baik. Seorang komandan atau pemimpin yang tidak konsekuen atas apa yang diucapkannya dan tidak bertanggungjawab akan membuat anak buah kehilangan tempat berpegang dan mengalami konflik, sehingga akan berpengaruh terhadap terjadinya penyimpangan dan tindak pidana oleh prajurit. Tidak semua pemimpin menerapkan sistem kepemimpinan yang baik, kebanyakan dari mereka

menganggap bahwa dirinya sebagai senioritas yang harus dihormati. Segala perilaku dan tindakan yang dilakukan olehnya dilakukan dengan semena-mena sehingga menimbulkan konflik terhadap bawahannya. Hal inilah yang menjadi pemicu tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit TNI.

Situasi Lingkungan Kerja Dan Pangkalan Lingkungan kerja yang dinamis dan pangkalan yang teratur dan bersih berpengaruh terhadap sikap seseorang. Situasi kerja yang monoton dan pangkalan yang sepi dan tidak teratur akan sangat menjemukan sehingga mendorong prajurit memasuki situasi yang menekan (stress) dan berpengaruh terhadap moral prajurit. Beban tugas yang melebihi kemampuan fisik dan mental seseorang dapat memicu timbulnya tingkat stress yang apabila tidak mendapat perhatian dan penanganan akan menimbulkan terjadinya tindak pidana. Kasus insubordinasi prajurit disatukan salah satunya disebabkan oleh adanya beban tugas yang diluar kemampuan fisik dan mental psikologis prajurit yang bersangkutan, sehingga berdampak terjadinya tindak pidana insubordinasi. Seringkali prajurit TNI yang dibebani tugas berat sedangkan tugas yang lainnya belum diselesaikan. Hal ini menimbulkan pemberontakan dan rasa tidak nyaman pada diri prajurit TNI, sehingga timbul pemberontakan yang akhirnya terjadi perlawanan terhadap seorang atasan (insubordinasi).

Apabila melihat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa bermaksud untuk menantang atau mengajak berkelahi terhadap atasan. Sehingga hal tersebut yang menjadi alasan bahwasanya perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana. karena adanya bahasa isyarat untuk mengancam dengan kekerasan terhadap atasan. Apabila melihat perbuatan yang dilakukan terdakwa koptu superman menolak “*Jungkir*” terhadap atasannya ialah pelanggaran hukum

disiplin militer. Dalam Undang-undang republik indonesia nomor 26 tahun 1997 tentang hukum disiplin prajurit angkatan bersenjata republik indonesia (ABRI), pelanggaran disiplin militer dibagi menjadi dua yaitu pelanggaran disiplin militer murni dan pelanggaran disiplin militer tidak murni.

Pengertian hukum disiplin militer ialah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer. Jenis pelanggaran hukum disiplin militer terdiri atas setiap perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer dan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang *sedemikian ringan* sifatnya.⁴⁵ Hukuman disiplin militer berupa teguran, penahanan disiplin ringan paling lama 14 hari atau penahanan disiplin berat paling lama 21 hari.⁴⁶ Penjatuhan hukuman disiplin militer yang berupa teguran dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁷ Contohnya ialah anggota militer yang menolak dan tidak melaksanakan perintah dari atasannya.

Sehingga menurut hemat serta pendapat penulis bahwasanya unsur mengancam kekerasan terhadap atasan yang terdapat didalam pasal 105 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dikaitkan dengan perkara Koptu Suparman diatas maka unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Akan tetapi apabila perkara Koptu Suparman diatas dikaitkan serta dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer maka unsur-

⁴⁵Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

⁴⁶Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

⁴⁷Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

unsurnya terpenuhi. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh Koptu Suparman seharusnya melanggar pasal 105 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Oleh karena itu juga maka perbuatan yang dilakukan Koptu Suparman merupakan tindakan insubordinasi. Dengan demikian Majelis Hakim didalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara kasus Koptu Suparman dalam Pengadilan Militer sebagai peradilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Militer sebagai peradilan tingkat banding telah sesuai dan memenuhi unsur didalam memutus perkara tersebut.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor: 252 K/MIL/2016

Koptu Suparman dinilai melakukan sebuah tindakan pidana sehingga diadili didalam Pengadilan Militer, Pengadilan Tinggi Militer bahkan sampai Mahkamah Agung. Hal tersebut dilakukan oleh Koptu Suparman dengan kasus posisi sebagai berikut:

Pada tanggal 27 Juni 2015, Terdakwa yang bertempat di Kompi Markas Yonif-200/Raider yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak Pidana Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, mengancam dengan kekerasan terhadap atasan. Terdakwa yang baru selesai menjalani hukuman di Masmil Cimahi menghadap Lettu Inf Ahmad Taufik untuk menanyakan laporan isteri Terdakwa tentang kiriman kiriman SMS cabul dari orang yang tidak dikenal. namun menurut pengakuan isteri terdakwa kepada Terdakwa, bahwa laporannya tidak ditanggapi oleh Lettu Inf Ahmad Taufik

sehingga Lettu Inf Ahmad Taufik memerintahkan Terdakwa untuk mengajak isteri terdakwa ke Kima Yonif-200/Raider agar permasalahannya jelas, karena Lettu Inf Ahmad Taufik merasa tidak pernah menerima laporan dari isteri terdakwa tentang kiriman-kiriman SMS cabul dari orang-orang yang tidak dikenal. Pada saat Terdakwa menghadap Lettu Inf Ahmad Taufik, Lettu Inf Ahmad Taufik beranggapan bahwa Terdakwa melawan perintah dari dirinya, kemudian Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk jungkirnamun ditolak. Sehingga timbul perselisihan diantara terdakwa dan Lettu Inf Ahmad Taufik yang mengakibatkan pipi kiri terdakwa ditampar oleh Lettu Inf Ahmad Taufik. Lettu Inf Ahmad Taufik melihat Terdakwa menunjukkan sikap menantang dengan cara membuka kopel, dan baju dinas dan beranggapan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Insubordinasi yaitu *‘Militer yang sengaja mengancam kekerasan terhadap atasan’*.⁴⁸

1. Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 17-K/PM-I-04/AD/II/2016

Pada kasus perkara nomor 17-K/PM I-04/AD/I/2016 dengan terdakwa Suparman. Majelis Hakim dalam perkara ini diketuai oleh Surono, yang juga Merupakan Hakim Pengadilan Militer Palembang. Terdakwa kasus ini yang bernama Suparman berstatus sebagai anggota Tentara Negara Indonesia (TNI) Angkatan Darat yang ditugaskan di yonif 145/Balau Serong Banyuasin sekarang menjadi Yonif-200 Raider berpangkat kopral satu dengan Nrp.31960531220476. Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana insubordinasi dengan cara mengancam kekerasan terhadap atasan. Dalam tuntutananya pun terdakwa dituntut

⁴⁸dikutip dari Pengadilan Militer Tinggi I Medan, “Putusan Nomor 51-K/PMT-I/BG/AD/IV/2016, hlm 1.

oleh Oditur Militer dengan pasal 105 ayat (1) KUHPM dengan pidana penjara selama 7 bulan penjara. Majelis hakim memutuskan terdakwa dengan pasal yang sama yaitu pasal 105 ayat (1) KUHPM dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan penjara atas dasar militer yang dengan sengaja mengancam kekerasan terhadap atasan.⁴⁹

Dalam pembuktiannya terdakwa mengaku tidak melakukan penyerangan secara langsung terhadap atasannya, namun terdakwa hanya membuka kopel, baret, baju dan kaos loreng sehingga bertelanjang dada. Hal tersebut terdakwa lakukan karena terdakwa tidak terima ditempeleng kedua kali oleh atasannya. Namun majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak mencerminkan sebagai prajurit TNI yang berjiwa sapta marga dimana sebagai seseorang seorang bawahan seharusnya patuh dan taat kepada komandan dan majelis hakim berpendapat terdakwa harus dihukum dengan seadil-adilnya untuk memberikan efek jera baik terhadap terdakwa sendiri maupun untuk anggota lainnya agar tidak melakukan hal yang sama.

Jadi dalam kasus ini majelis hakim dalam amarnya menjatuhkan putusan pasal 105 ayat (1) atas dasar militer yang dengan sengaja mengancam kekerasan terhadap atasan dengan hukuman pidana penjara yakni selama 5 (lima) bulan penjara. dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan penjara.

Penerapan putusan hakim terhadap terdakwa koptu suparman yang melakukan tindak pidana insubordinasi telah sesuai. Berdasarkan proses pemeriksaan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa yang diperoleh di

⁴⁹Dikutip dari Pengadilan Militer I-04 Palembang, Putusan Nomor : 17-K/PM-I-04/AD/II/2016

sidang pengadilan, maka terungkaplah fakta – fakta yang sesuai yaitu adanya bukti bahwa terdakwa koptu superman telah melakukan tindak pidana insubordinasi.

Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana insubordinasi terhadap terdakwa koptu superman telah sesuai dengan pasal 183 KUHAP tentang dasar memutus dimana dalam pasal tersebut berbunyi *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya"* dan dalam pasal 184 KUHAP tentang alat bukti diantaranya: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Vonis pidana penjara selama 5 (tujuh) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan dalam perkara ini sangatlah tidak adil. Dikarenakan hakim seharusnya memperoleh bukti yang diajukan di muka persidangan dimana bukti – bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHAP. Alat bukti harus dikatakan sah jika dihadapkan di persidangan ketika acara pemeriksaan dilaksanakan di pengadilan. Dengan demikian Majelis Hakim didalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara kasus Koptu Superman dalam Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 174-K/PM I-04/AD/XI/2013 telah sesuai menerapkan hukum menurut KUHPM.

2. Putusan Pengadilan Militer Tinggi – I Medan Nomor : 51-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2016

Pada kasus perkara nomor 51-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2016. Majelis Hakim dalam perkara ini diketuai oleh Roza Maimun, dengan terdakwa Suparman. Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya yaitu terdakwa tidak ada melakukan penyerangan secara langsung terhadap atasannya (Lettu Ahmad Taufik), namun terdakwa hanya membuka kopel, baret, baju dan kaos loreng sehingga bertelanjang dada, hal tersebut terdakwa lakukan karena tidak terima ditempeleng yang kedua kali oleh atasannya. Terdakwa juga tidak pernah mengeluarkan kata-kata ancaman kepada atasannya. Terdakwa hanya mengatakan “saya tidak terima danti, akan saya laporkan.” Hal tersebut dilakukan untuk mencari perlindungan kepada komandan batalyon dari perbuatan atasan yang telah menamparnya. Didalam persidangan Lettu Ahmad Taufik mengakui dan menyadari bahwa peristiwa yang terjadi pada hari sabtu tanggal 27 juni 2015 sekitar pukul 10.15 wib hanyalah suatu kesalahpahaman. Kemudian dengan uraian fakta yang sebenarnya terjadi mengenai pembuktian oditur militer tentang tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan tidak terbukti sehingga tuntutan oditur militer harus ditolak. Oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi dalam pembuktian tuntutan, maka terdakwa memohon untuk dibebaskan dari tuntutan oditur militer.⁵⁰

Berdasarkan fakta yang terjadi, majelis hakim mengemukakan pendapat yang berbeda. Nyatanya perbuatan terdakwa menurut majelis hakim telah memenuhi unsur tindak pidana insubordinasi sebagaimana diatur dalam pasal 105

⁵⁰Dikutip dari Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor : 51-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2016 hal.2

ayat (1) KUHPM karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mencerminkan sebagai prajurit TNI yang berjiwa Sapta Marga dimana sebagai seorang bawahan seharusnya patuh dan taat kepada komandan. Disamping itu, untuk memberikan efek jera terhadap terdakwa maupun untuk anggota lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

Jadi dalam kasus ini majelis hakim dalam amarnya menolak memori banding dari terdakwa dan menguatkan putusan sebelumnya. Akan tetapi, majelis hakim memperbaiki pasal 105 ayat (1) KUHPM atas dasar militer yang dengan sengaja mengancam kekerasan terhadap atasan dengan hukuman pidana penjara yakni selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari penjara.

Alasan hakim memperbaiki putusan sebelumnya yaitu putusan pengadilan militer I-04 Palembang tidak tepat, majelis hakim harus menelaah dahulu unsur-unsur perbuatannya sehingga hakim dalam menyelesaikan perkara tidak melanggar norma-norma dan aturan-aturan hukum.

3. Faktor Dan Alasan Hakim Mahkamah Agung Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Koptu Suparman

Hakim pada Mahkamah Agung didalam mengadili perkara pada tingkat kasasi dengan nomor : 252 K/MIL/201 tidak memenuhi persyaratan serta tugasnya menjadi sebuah majelis dalam memeriksa serta mengadili pada tingkat kasasi peradilan yang mana berkewajiban untuk menjaga kemandirian peradilan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Majelis hakim dalam perkara tersebut yang diketuai oleh Andi AyyubSaleh telah memberikan putusan bebas dengan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts*

vervolging) dengan melihat serta memeriksa dengan seksama peradilan pada *judex juris* dimana memeriksa penerapan hukum serta proses peradilan pada tingkat pertama dan tingkat banding sudah sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak menggali kembali fakta-fakta yang ada dilapangan serta membuktikan fakta-fakta dipersidangan, hal tersebut dikarenakan merupakan kewenangan Majelis Hakim yang mengadili pada tingkat pertama dan banding yaitu berupa *judex facti*.

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 Ayat (9) KUHAP). Ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum maka jika aturan hukum tidak ada ia harus menggantinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkan dan jika tidak ada aturan hukum tertulis ia dapat menggunakan hukum adat.

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 5 Undang-Undang No.48 Tahun 2009).

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. (pasal 17 Ayat (3-5) Undang-Undang No.48 Tahun 2009).

Didalam amar putusan hakim pada peradilan militer tingkat pertama yaitu Pengadilan militer I-04 Palembang bahwasannya Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa koptu suparman dinyatakan bersalah dan melawan hukum sehingga terdakwa dipidana dengan pidana penjara. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim pada saat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan militer I-04 Palembang pada hari rabu tanggal 5 januari 2016 terdapat 3 hakim menyatakan terdakwa bersalah, maka berdasarkan pasal 14 ayat (3) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman maka pendapat yang digunakan ialah pendapat 2 orang hakim (suara terbanyak) sehingga, Terdakwa harus dipersalahkan melakukan tindak pidana insubordinasi sebagaimana tercantum dalam dakwaan primair Penuntut Umum.

Ketika didalam amar putusan hakim pada peradilan tingkat banding yaitu Pengadilan militer tinggi medan bahwasannya majelis hakim memutuskan untuk menerima permintaan banding dari oditur militer dan terdakwa, menguatkan Putusan Pengadilan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 174-K/PM I-04/AD/XI/2013 tanggal 5 januari 2016 yang dimintakan banding tersebut, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Hal ini dikarenakan oditur militer

mengajukan memori banding yang berisi keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Perbuatan terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku terdakwa yang tidak menghiraukan aturan hukum yang berlaku terhadap prajurit TNI terkait kewajiban seorang bawahan terhadap atasan.
- b. Terdakwa melakukan perbuatan ini karena merasa laporan isterinya yang meminta perlindungan dari gangguan orang yang sering menelpon yang mengajak perbuatan tidak senonoh saat terdakwa menjalani pidana di masmil cimahi tidak ditanggapi oleh lettu inf ahmad taufik selaku dankima.
- c. Sertapada hakikatnya perbuatan terdakwa bertentangan dengan aturan hukum khususnya hukum yang berlaku bagi prajurit TNI yakni hukum pidana militer dan hukum disiplin militer yang harus menghormati saksi 1 sebagai atasannya..⁵¹

Sedangkan Hakim pada peradilan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung yang mengadili pada tingkat kasasi perkara dengan Nomor : 252 K/MIL/2016 tidak menolak perkara yang masuk kepadanya. Maka dari itu dengan ketua majelis Andi Ayyub Saleh tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan maksimal sesuai dengan peraturan perundnag-undangan yang berlaku. majelis hakim pada peradilan tingkat kasasi tersebut juga tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat dengan

⁵¹dikutip dari Pengadilan Militer Tinggi I Medan, "Putusan Nomor 51-K/PMT-I/BG/AD/IV/2016, hlm 7.

terdakwa. Serta majelis hakim tersebut juga tidak mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara, hal ini dikarenakan majelis hakim tersebut semata hanya menjalankan tugas untuk memeriksa serta mengadili perkara yang masuk pada mahkamah agung dengan nomor : 252 K/MIL/2016 karena ditunjuk oleh ketua mahkamah agung untuk mengadili perkara tersebut pada tingkat kasasi.

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain, ia harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukum untuk bertanya kepada saksi saksi, begitu pula Penuntut Umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.⁵² Ada lima hal menjadi tanggung jawab Hakim yaitu :⁵³

- 1) Justisialis Hukum; yang dimaksud justisialis adalah meng-adilkan. Jadi putusan Hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan *doel matigheid* perlu di-adilkan. Makna dari hukum *de zin van het recht* terletak dalam *gerechtigheid* keadilan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab jurist yang terletak dalam justisialisasi daripada hukum.

⁵²Andi Hamzah, KUHP dan KUHP (Rineka Cipta: Jakarta, 1996) hal.101

⁵³Nanda Agung Dewantoro, Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana (Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987) hal. 149

- 2) Penjiwaan Hukum; dalam berhukum *recht doen* tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.
- 3) Pengintegrasian Hukum; hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan daripada hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan Hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hukum dapat diintegrasikan dalam hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju ke pemulihan pada posisi asli *restitutio in integrum*.
- 4) Totalitas Hukum; maksudnya menempatkan hukum keputusan Hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, di bawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial, sebaliknya di atas Hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh Hakim dalam keputusan hukumnya, di saat itu juga segi social-ekonomis menuntut pada Hakim agar keputusannya memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial-ekonomis.
- 5) Personalisasi Hukum; personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan pada personal (kepribadian) dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia yang berpribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam

personalisasi hukum ini memunculkan tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung), di sini hakim dipanggil untuk bisa memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandanginya sebagai pribadi yang mencari keadilan.

Ketika hakim dihadapkan oleh suatu perkara, dalam dirinya berlangsung suatu proses pemikiran untuk kemudian memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :⁵⁴

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.
 - 2) Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah serta dapat dipidana.
 - 3) Keputusan mengenai pidananya, yaitu terdakwa memang dapat dipidana.
- Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari memeriksa dan kesaksian dalam sidang pengadilan (Pasal 188 Ayat (3) KUHP), sesudah itu hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas surat dakwaan dan didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang telah terbukti dalam pemeriksaan sidang.

Majelis Hakim yang mengadili pada tingkat kasasi dengan perkara Nomor : 252 K/MIL/2016 yang mana diketuai oleh Andi Ayyub Saleh menurut hemat peneliti berdasarkan terobosan serta pendapatnya didalam ketentuan menimbang

⁵⁴ Sodarto, op.cit., hal.74

tidak menguasai hukum secara filosofis, yuridis dan sosiologis sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia. Dapat diketahui bahwasanya Hakim Andi Ayyub Saleh merupakan hakim senior dengan terobosan-terobosan putusan pengadilan yang berani serta memberikan keadilan serta kemanfaatan bagi pencari keadilan ditengah-tengah meja hijau. Majelis Hakim pada perkara tersebut dinilai tidak aktif dalam menggali *judex juris* pada saat didalam persidangan sehingga didalam amar putusannya sangat berbeda dengan putusan peradilan pada tingkat pertama yaitu Pengadilan militer I-04 Palembang dan peradilan pada tingkat banding yaitu Pengadilan militer tinggi I medan. Putusan Majelis Hakim pada perkara tersebut tidak mengedepankan keadilan terdakwa dengan pendapat seorang terdakwa merupakan seorang yang dikorbankan atau dikriminalisasikan oleh atasannya, sehingga terdakwalah yang kemudian akhirnya diadili.

Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut juga kurang menjaga tanggung jawabnya dalam hal totalitas, kredibilitas dan kapabilitasnya, dimana majelis hakim tidak melihat fakta-fakta yaitu berupa bahwa atasannyalah yang menjadi korban kesewenangan seorang bawahan terhadap atasan, dimana terdakwa telah membantah perintah atasan untuk jungkir. Dalam perbuatan terdakwa melepas baret, kopel dan baju ke tanah dapat disebut sebagai pelecehan kepada atasan dan kesatuan TNI. Bahwa sejak kejadian antara terdakwa dan saksi 1 sudah saling memahami ternyata hanya kesalahpahaman saja dan saling memaafkan. Setiap harinya hubungan antara terdakwa dengan saksi 1 sudah seperti biasa sebagaimana antara atasan dan bawahan. Majelis hakim yang mengadili perkara tersebut tidak melihat itu semuanya yang mana seharusnya alasan-alasan tersebut semestinya digali serta

dibuktikan pada *judex facti* yaitu peradilan pada tingkat pertama dan tingkat banding.

Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut didalam menjatuhkan amar putusan menurut hemat peneliti tentunya tidak mempelajari semua berkas perkara dengan cermat dan teliti dimana pada akhirnya diperoleh sebuah keputusan pengadilan didalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim terkait keputusan mengenai peristiwanya yang kemudian diperoleh sebuah kesimpulan dari putusan tersebut, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana insubordinasi yang telah dituduhkan kepadanya ataukah tidak . Majelis Hakim yang diketuai oleh Andi Ayyub Saleh memberikan amar putusan yang diluar dugaan yaitu putusan bebas terhadap terdakwa dimana putusan bersalah dan pemidanaan telah dijatuhkan oleh 2 Majelis Hakim sebelumnya pada tingkat pertama dan banding. Akan tetapi Majelis Hakim pada tingkat kasasi rupanya melihat sisi lain yang dirasa serta direnungkan telah dikriminalisasikan terhadap atasan.

Majelis Hakim juga cenderung gegabah untuk memikirkan apakah putusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah serta dapat dipidana. Sehingga didalam putusannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Andi Ayyub Saleh menilai bahwasannya perbuatan terdakwa yang didakwakan dalam dakwaan primair, subsidair terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana, sehingga Majelis Hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts vervolging*), memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya,

memerintahkan supaya terdakwa dibebaskan dari tahanan, serta membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan kepada Negara. Adanya perbedaan pandangan antara hakim mahkamah agung dengan hakim militer di tingkat pengadilan militer sebelumnya menjadi tidak tepat dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Sehingga dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan amar putusan terhadap terdakwa dengan nomor perkara nomor : 252 K/MIL/2016 pada tingkat kasasi dengan ketua majelis hakim yaitu Andi Ayyub Saleh merupakan pertimbangan yang sangat bertentangan dengan surat tuntutan dari oditur militer . Dimana semua pertimbangan penuntut umum serta Majelis Hakim pada 2 tingkat peradilan sebelumnya yaitu tingkat pertama dan tingkat banding ditolak serta dinyatakan tidak dapat diterima pada tingkat kasasi. Sehingga peradilan pada tingkat kasasi perkara tersebut telah salah dalam mengadili *judex juris* dengan tidak melihat proses beracara serta kesesuaian penerapan system peradilan yang sesuai dengan peraturan perundnag-undangan maka Majelis Hakim telah salah memutuskan putusan bebas terhadap terdakwa. Apabila terdapat anggota TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi terhadap atasannya, atasan yang berhak menghukum atau yang dinamakan ankum harus mengetahui unsur perbuatan yang dapat dikatakan melakukan tindak pidana insubordinasi tersebut.

Sehingga dengan seperti yang telah penulis uraikan serta jelaskan diatas maka dasar pertimbangan para Majelis Hakim pada peradilan tingkat pertama yaitu pengadilan militer I-04 Palembang , dasar pertimbangan majelis hakim pada peradilan tingkat banding yaitu Pengadilan militer tinggi I medan, serta dasar

pertimbangan para majelis hakim pada peradilan tingkat kasasi yaitu Mahkamah Agung mengalami perbedaan didalam amar putusannya.

Beberapa faktor dan alasan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa koptu Superman, penjelasan sebagai berikut:

a) Terdakwa sebagai pertimbangan hakim

Dasar pertimbangan yang telah dikemukakan oleh hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa koptu superman adalah memang terdakwa dituntut dengan pasal 105 ayat (1) KUHPM yang dalam pasal tersebut terdapat kata-kata “Militer yang dengan sengaja mengancam kekerasan terhadap atasan”, namun majelis hakim Mahkamah Agung berpendapat perlu adanya penggalan mengenai unsur-unsur dari pasal 105 ayat (1) KUHPM, terutama unsur “*mengancam kekerasan terhadap atasan*” yakni mengenai tindak pidana insubordinasi.

b) Alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi / terdakwa

Alasan-alasan kasasi yang dibuat oleh Pemohon kasasi/terdakwa dalam perkara tindak pidana insubordinasi mempunyai esensi dan juga peranan yang penting dalam persidangan. Hal demikian disebabkan berdasarkan pertimbangan hakim tersebut hakim memberikan putusan bebas terhadap fakta perbuatan mengenai tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh terdakwa , dan

perbuatan tersebut terbukti yang didukung oleh alasan yang sah menurut undang-undang serta keyakinan majelis hakim.

- c) Pemeriksaan bukti dan fakta perkara (*judex facti*) dari pengadilan militer tinggi I medan yang tidak tepat dalam penerapan hukum

Majelis hakim membenarkan alasan-alasan kasasi terdakwa karena *judex facti* pengadilan militer tinggi I medan telah salah dalam menerapkan hukum yaitu dalam membuktikan unsur “*sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan.*” Dalam hal perbuatan terdakwa melepas baret, kopel dan bajunya lalu dilempar ke tanah merupakan bentuk pembelaan terdakwa agar tidak dipukul lagi oleh atasannya.

Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana insubordinasi dalam pasal 105 ayat (1) KUHPM belum memenuhi unsur dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, karena penerapan ketentuan tersebut mengharuskan bahwa secara faktual perbuatan terdakwa bisa disebut mengancam kekerasan terhadap atasan apabila terdakwa memukul, menendang atau mendorong atasan, meskipun perbuatannya tidak keras. Dengan kata lain, harus ada gerakan fisik yang mengenai tubuh atasan dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja.

Sehingga majelis hakim mempertimbangkan perlunya penolakan terhadap dakwaan oditur militer tentang pasal 105 ayat (1) KUHPM karena perbuatan terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan. Dan selanjutnya, *judex juris* mengadili perkara terdakwa dengan mengabulkan permohonan kasasi dari

pemohon kasasi/terdakwa dan membatalkan putusan pengadilan militer tinggi I medan nomor: 51-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2016 tanggal 13 juli 2016 yang memperbaiki putusan pengadilan militer I-04 palembang nomor: 17-K/PM I-04/AD/I/2016 tanggal 25 februari 2016. Kemudian mengadili menyatakan terdakwa Suparman, koptu, NRP 31960531220476 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana insubordinasi, serta membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.

Penulis berpendapat majelis hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa koptu suparman telah salah dan tidak sesuai apabila kita melihat perbuatan terdakwa suparman yang memenuhi unsur mengancam dengan kekerasan terhadap atasan. Yang dimaksud perbuatan terdakwa memenuhi unsur sebagaimana pasal 105 ayat (1) KUHPM, terdakwa tidak ada niatan untuk mengajak berkelahi tetapi perbuatan terdakwa memberontak atasannya akan melaporkan kepada danyon telah melanggar pasal 5 KUHPM. Perbuatan terdakwa yang hanya melakukan pembelaan dengan membuka baju , kopel , kaos loreng ke lantai agar tidak ditempeleng untuk kedua kali oleh atasannya tidak dapat dibenarkan. Salah satu tugas atasan terhadap bawahannya ialah mengatur bawahannya agar mempunyai mental yang mandiri yang telah dijelaskan dalam disiplin militer. Majelis hakim mahkamah agung juga menerima alasan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa. Oleh karena itu, penulis berpendapat hakim pengadilan militer palembang dan pengadilan militer tinggi medan telah sesuai dalam menerapkan hukum.

Sehingga tindakan Koptu Suparman didalam kasus diatas dapat disebut terdakwa melakukan tindaka pidana insubordinasi dan terdakwa melakukan

pelanggaran terhadap disiplin militer prajurit ABRI. Tindakan yang dilakukan oleh Koptu Suparman melanggar pasal 105 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan juga melanggar Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI. Dengan demikian Majelis Hakim didalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara kasus Koptu Suparman dalam Mahkamah Agung sebagai peradilan tingkat kasasi menemukan sebuah kesesatan hakim didalam memutus perkara tersebut.



BAB V

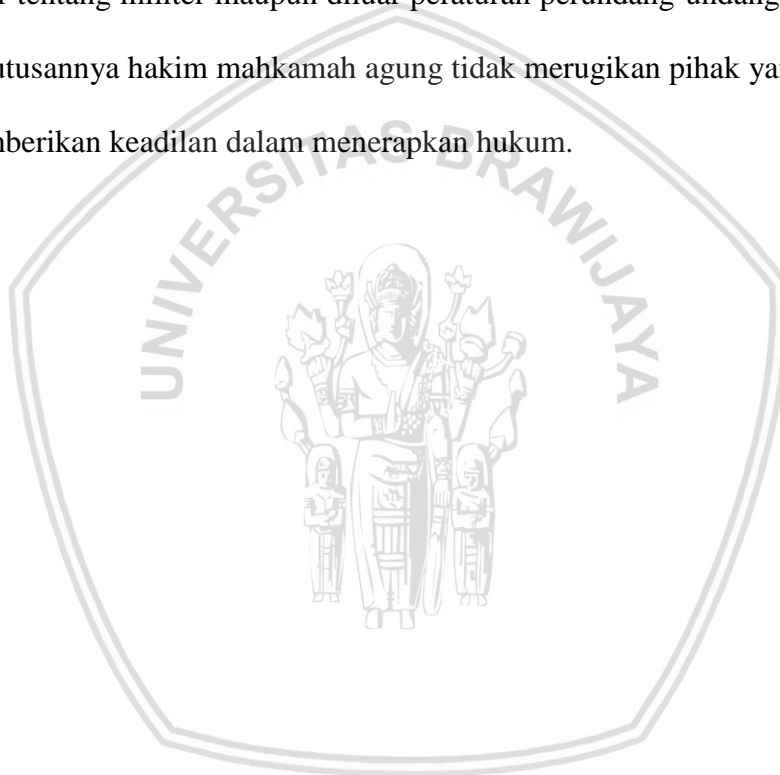
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbuatan yang dilakukan terdakwa koptu superman terhadap atasannya merupakan tindak pidana insubordinasi sebagaimana diatur dalam pasal 105 KUHPM. Perbuatan terdakwa yang menolak perintah atasannya untuk menghukum terdakwa dengan cara jungkir dan mengancam atasannya untuk melaporkan atasannya kepada atasan lebih mengarah kepada tindak pidana insubordinasi sebagaimana terdapat dalam pasal 105 KUHPM.
2. Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung telah salah dalam menjatuhkan vonis bebas terhadap koptu superman ialah terdakwa koptu superman telah memenuhi unsur pasal 105 ayat (1) KUHPM yaitu tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan, karena penerapan ketentuan tersebut mengharuskan bahwa secara faktual perbuatan terdakwa bisa disebut mengancam apabila adanya isyarat untuk melakukan kekerasan terhadap atasan. Isyarat terdakwa melakukan kekerasan terhadap atasan ialah melawan perintah atasan dan mengancam akan melaporkan atasannya kepada atasan.

B. Saran

Hakim militer dan hakim mahkamah agung memiliki pandangan yang berbeda dalam memutus suatu perkara. Hakim mahkamah agung harus menelaah terlebih dahulu unsur-unsur perbuatan yang dilakukan terdakwa. Apabila latar belakang terdakwa adalah seorang anggota militer, Hakim mahkamah agung dalam menyelesaikan perkara tersebut haruslah melihat perundang-undangan yang mengatur tentang militer maupun diluar peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam putusannya hakim mahkamah agung tidak merugikan pihak yang berpekara dan memberikan keadilan dalam menerapkan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad Rifai, **Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Andi Hamzah, **Pengantar Hukum Acara Pidana**, Liberty, Yogyakarta, 1996

Andi Hamzah, **KUHP dan KUHPA**, Rineka Cipta: Jakarta, 1996

A.S.S Tambunan, **Hukum Disiplin Militer Suatu Kerangka Teori**, Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTM", Jakarta, 2013

Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008

Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012

Frans Maramis, **Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Herdjito, **Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi**, (penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan badan litbang diklat KUMDIL Mahkamah Agung)

M. Marwan, Jimmy P (Ed), **Kamus Hukum**, Reality Publisher, Surabaya, 2009

M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPA** (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Marjoto, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal**, Jakarta, 1958

Moch Faisal Salam, **Peradilan Militer Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 1994

Nanda Agung Dewantoro, **Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana**, Aksara Persada, Jakarta, 1987

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Pustaka Media Group, Jakarta, 2010

R. Abdoel Djamali, **Pengantar Hukum Indonesia**, Raja Grafindo, Jakarta, 2009

Rini Dewi Heniarti, **Sistem Peradilan Militer Di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2017

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan 14-Juni 2012

S.R Sianturi, **Hukum Pidana Militer Di Indonesia**, Alumni AHAEM-PATEHAEM, Jakarta, 1985

Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**, Rienike Cipta, Jakarta, 2002

W.J.S. Poerwodiminto, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1976

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)

Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 174-K/PM I-04/AD/XI/2016

Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 51-K/PMT-1/BDG/AD/2016

Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/MIL/2016

Buku Saku Prajurit, Edisi Maret 2006, Mabes TNI Badan Pembina Hukum